

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0154/PL32/PJ/2026  
TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN  
TAHUN 2025-2029


DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana strategis di lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan, perlu adanya Penetapan Rencana Strategis tersebut.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan dalam keputusan Direktur Politeknik Negeri Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan dan Memberlakukan Rencana Strategis dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 20 April 2026  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN,



B. M. AZMANAJAYA  
NIP. 197702242012121001



**ECO-TECH**  
FUSION CAMPUS  
TRANSFORMING TODAY, SUSTAINING TOMORROW.

# RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

**TAHUN 2025-2029**



# LEMBAR PENGESAHAN

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029

Disahkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : 20 April 2026

Direktur



**Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T.**  
**NIP. 197702242012121001**

## TIM PENYUSUN

Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T.  
Prof. Dr. Tuatul Mahfud, S.Pd., M.Pd.  
Dr. Hadi Hermansyah, S.Si., M.Si.  
Candra Irawan, S.Si., M.Si.  
Desak Made Ristia Kartika, S.Pd., M.Sc.  
Fitriyani, S.S., M.Sc.  
Hadiyanto, S.T., M.Eng.  
Subur Mulyanto, S.Pd., M.T.  
Ihsan, S.T., M.Kom.  
Ezra Hartarto Pongtuluran, S.T., M.Eng.  
Chardina Dianovita, S.Gz., M.Gz.  
Hendra Sanjaya Kusno, M.S.A.  
Danu Hermawan, S.Si.  
Muh. Abdul Kadir, S.E.  
Nurida Fajar, S.Sos., M.Si.  
Brahma Krisdyo, S.Kom.  
Dwi Wahyuni, S.Pd.  
Satryo Kusuma Wibowo, S.Pd., M.S.  
Irnawati, S.E.

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN .....	25
2.1. Visi .....	25
2.2. Misi .....	25
2.3. Tujuan .....	25
2.4. Sasaran.....	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	27
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian .....	27
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi .....	35
3.3. Kerangka Regulasi .....	43
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	46
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	58
4.1. Target Kinerja.....	58
4.2. Kerangka Pendanaan .....	60
BAB V PENUTUP .....	63
LAMPIRAN .....	64

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Balikpapan Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman arah pengembangan Politeknik Negeri Balikpapan dalam kurun waktu tertentu, yang disusun sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Renstra ini juga menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi institusi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap Renstra Politeknik Negeri Balikpapan Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya pengembangan perguruan tinggi menuju institusi yang unggul, mandiri, bermartabat, serta diakui dunia.



Direktur

*Dr. Emil Azmanajaya*  
**Dr. Emil Azmanajaya, S.T., M.T.**  
**NIP. 197702242012121001**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Pada bagian ini akan dijelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra, kondisi internal, capaian kinerja Poltekba pada periode Renstra sebelumnya, secara simple data ini dapat diambil dari Laporan kinerja tahun 2020 s.d. 2024 dengan pencapaian yang diperoleh factor penghambat dan faktor pendukung pencapaian kinerja, serta aspirasi dari pemangku kepentingan terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan.

Dalam pengembangan yang berkelanjutan, Poltekba terus melakukan Upaya peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kapasitas dalam rangka menjawab kebutuhan *stakeholder* dari industri Kalimantan dan dari industri nasional maupun internasional pada umumnya. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan membuka jurusan baru yaitu Jurusan Akutansi dan beberapa program studi baru pada jurusan-jurusan yang ada. Hingga saat ini Poltekba telah memiliki 5 (lima) jurusan dan 12 (dua belas) Prodi, diantaranya: **Jurusan Teknik Mesin** terdiri dari Prodi D-III Alat Berat dan Prodi D-IV Teknologi Rekayasa Manufaktur; **Jurusan Teknik Sipil** terdiri dari Prodi D-III Teknik Sipil, Prodi D-IV Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, dan Prodi D-IV Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air; **Jurusan Rekayasa Elektro** terdiri dari Prodi D-III Teknik Elektronika, Prodi D-III Teknologi Listrik, dan Prodi D-IV Sistem Informasi Kota Cerdas; **Jurusan Pariwisata** terdiri dari Prodi D-III Tata Boga dan Prodi D-IV Pengelolaan Perhotelan, **Jurusan Bisnis** terdiri dari Prodi D-IV Perbankan Keuangan Digital dan Prodi D-IV Akuntansi Perpajakan.

Politeknik Negeri Balikpapan sebagai perguruan tinggi negeri satker yang dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya. Selain mandat dari kementerian, IKU Politeknik Negeri Balikpapan harus mampu menjadi alat ukur sekaligus akselator untuk pengembangan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah ditetapkan melalui peraturan menteri sebagai upaya menjamin lembaga pendidikan tinggi yang memiliki daya adaptasi yang adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan zaman dan lebih berdampak langsung bagi masyarakat serta mampu mencapai standar internasional perguruan tinggi.

Adapun Maksud dalam penyusunan Renstra Politeknik Negeri Balikpapan yaitu:

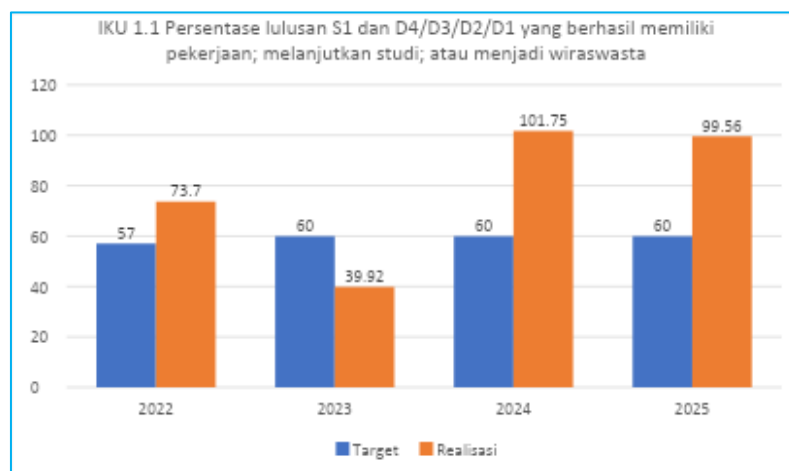
1. Menjadi pedoman dalam pengembangan institusi secara berkelanjutan dengan fokus pada visi, misi, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan.
2. Menetapkan arah strategis jangka menengah untuk mencapai tujuan jangka panjang institusi.

3. Menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan akademik, administratif, dan penunjang dalam satu panduan strategis.

Adapun Tujuan dalam penyusunan Renstra Politeknik Negeri Balikpapan adalah:

1. Mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Balikpapan dalam konteks lokal, nasional, dan global.
2. Mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pengajaran dan penelitian yang berkualitas.
3. Melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dan mendapatkan masukan untuk peningkatan konteks akademik dan administratif.

Pelaksanaan Renstra Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) periode 2020-2024 (Revisi III) berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator strategis telah mencapai target, namun terdapat beberapa area yang memerlukan intervensi berkelanjutan. Berikut ini, akan dipaparkan capaian dan realisasi IKU dari tahun 2022-2025.



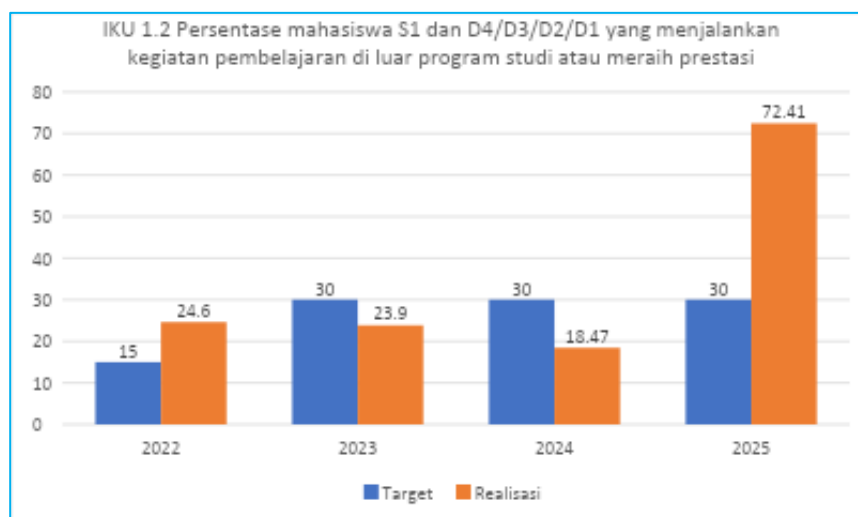
Gambar 1.1 Capaian IKU 1.1 (Dalam %)

Secara umum, capaian IKU 1.1 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan fluktuatif, dengan realisasi hampir selalu melampaui target, kecuali pada tahun 2023. Tahun 2022 realisasi sudah melebihi target. Sementara itu, untuk tahun 2024 dan 2025 realisasi sudah jauh melebihi target dengan target yang sama. Tahun 2024 realisasi 101,75% dan tahun 2025 realisasi 99,56%.

Beberapa faktor pendukung akan diuraikan yang menyebabkan realisasi tinggi. Kurikulum berbasis kebutuhan industri dimana lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja merupakan faktor pendukung. Berikutnya, program magang dan kerja sama dengan dunia usaha yakni mempercepat penyerapan

lulusan sebelum atau segera setelah wisuda. Selain itu, pusat karir yang aktif yakni layanan penyaluran kerja, pelatihan wawancara, dan job fair yang masif juga menjadi faktor pendukung. Dukungan kewirausahaan baik dari kementerian maupun institusi juga mendukung IKU 1.1. Termasuk peningkatan kualitas dosen dan pembelajaran. Adapun faktor penghambat khususnya realisasi turun pada tahun 2023 antara lain persaingan ketat dan kurangnya pengalaman, keterbatasan akses informasi dan modal, masih ada kesenjangan kurikulum dengan kebutuhan industri, dan faktor pribadi.

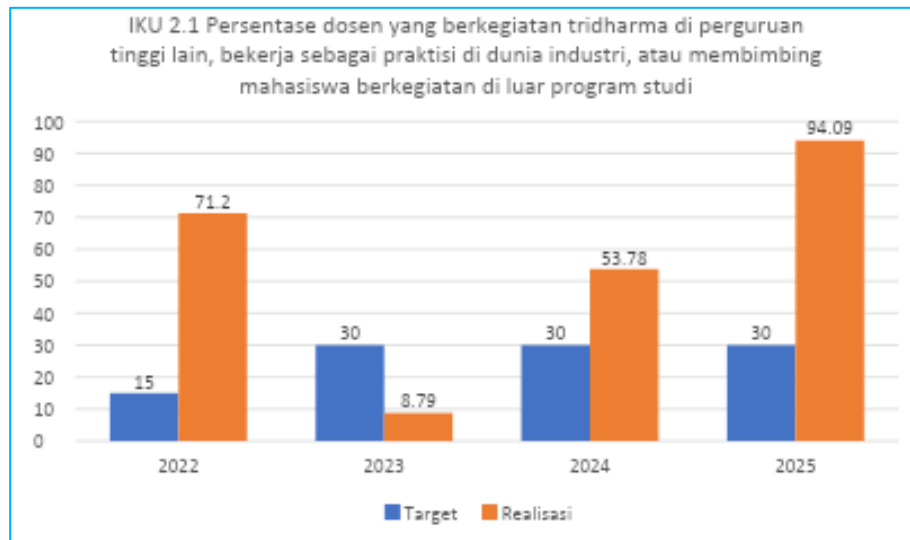
IKU 1.1 secara umum berhasil luar biasa, dengan realisasi konsisten di atas 99% pada dua tahun terakhir. Satu-satunya kelemahan adalah realisasi yang di bawah target pada tahun 2023 yang perlu dievaluasi mendalam.



Gambar 1.2 Capaian IKU 1.2 (dalam %)

Dapat terlihat dari grafik untuk tahun 2022 realisasi telah melebihi target, sementara 2023 realisasi turun dari target, demikian halnya untuk 2024. Namun, hal ini berbeda dengan 2025 dimana realisasi sudah jauh melampaui target. Adapun faktor pendukung antara lain dukungan kampus yang kuat, motivasi dan kesiapan mahasiswa, informasi kegiatan yang mudah diakses, ketersediaan fasilitas dan jejaring, dan lingkungan akademik yang suportif. Adapun faktor penghambat antara lain beban perkuliahan yang cukup tinggi, minimnya kepercayaan diri dan motivasi, dan kurangnya pendampingan dan budaya partisipasi.

IKU 1.2 menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Setelah dua tahun berturut-turut tidak mencapai target (2023-2024), terjadi lompatan luar biasa di 2025 hingga 72,41%, jauh melampaui target 30%. Hal ini menunjukkan bahwa institusi mampu melampaui target jika kondisi mendukung.



Gambar 1.3 Capaian IKU 2.1 (dalam %)

Persentase dosen yang berkegiatan Tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Dari grafik terlihat hanya tahun 2023 yang tidak mencapai target. Sementara tahun 2022, 2024, dan 2025 jauh melampaui capaian target. Adapun faktor pendukung antara lain kebijakan institusi yang fleksibel, kemitraan yang luas (MoU/MoA), dukungan pendanaan, kompetensi dan reputasi dosen, program Merdeka belajar-kampus Merdeka (MBKM), sistem pengakuan kinerja (BKD/IKU), akses jaringan profesional, dan teknologi digital. Adapun faktor penghambat antara lain beban kerja internal yang tinggi, kurangnya kerja sama eksternal, keterbatasan dana, regulasi yang kaku, kurangnya insentif, keterbatasan kompetensi praktis, hambatan administrative, keterbatasan waktu, dan kurangnya informasi peluang.



Gambar 1.4 Capaian IKU 2.2 (dalam %)

Capaian IKU 2.2 persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional, dunia usaha, atau dunia industri. Hanya pada tahun 2023 realisasi kurang dari target. Sementara itu, tahun 2022, 2024, dan 2025 semuanya melebihi dari target. Tahun 2022 realisasi jauh melebihi target. Adapun faktor pendukung antara lain kebijakan institusi yang pro terhadap sertifikasi dan praktisi, kerja sama dengan industri dan lembaga sertifikasi, dukungan pendanaan, program pengembangan SDM dosen, insentif dan pengakuan kinerja, kurikulum berbasis industri, dan jaringan industri yang kuat. Adapun faktor penghambat antara lain biaya sertifikasi yang tinggi, beban kerja dosen yang tinggi, kurangnya insentif, keterbatasan praktisi yang bersedia mengajar, dan *mismatch* kompetensi.

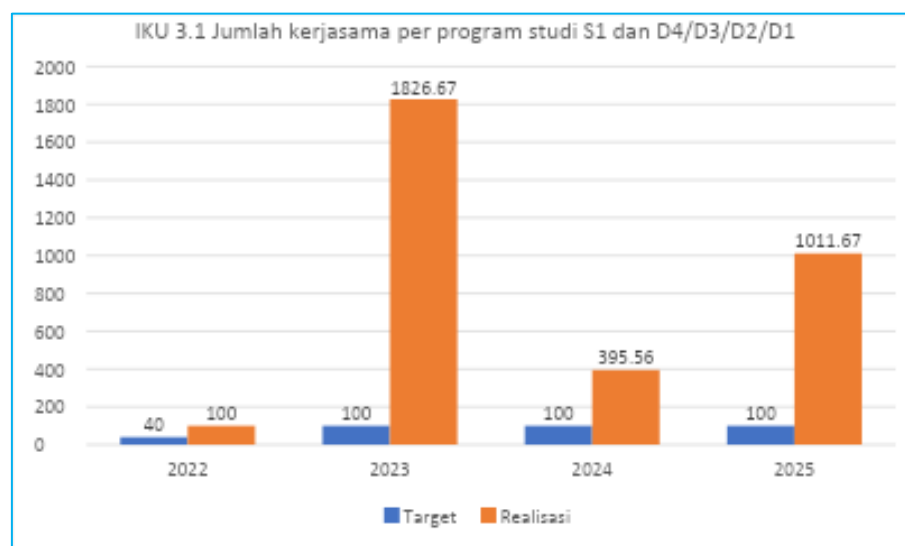


Gambar 1.5 Capaian IKU 2.2 (dalam rasio)

Grafik menunjukkan perkembangan Capaian IKU 2.3 jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen dari tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022, capaian masih sangat rendah (target 0,12 dan realisasi 0,17). Tahun 2023 menunjukkan lonjakan yang signifikan target 100, namun realisasi mencapai 83,3 berarti peningkatan substansial namun belum mencapai target. Tahun 2024 merupakan tahun terbaik dengan realisasi 113,27 dengan tetap melampaui target 100, menunjukkan peningkatan kualitas dan pengakuan keluaran dosen di tingkat internasional maupun industri. Tahun 2025 realisasi sedikit menurun menjadi 113,27, tetapi tetap melampaui target, menunjukkan tren positif dan stabilitas capaian.

Secara keseluruhan IKU 2.3 menunjukkan tren peningkatan kuat dan kinerja yang melebihi target dalam dua tahun terakhir, menandakan penguatan kontribusi dosen dalam pengakuan global serta penerapan hasil riset di Masyarakat atau industri.

Beberapa faktor pendukung pencapaian antara lain peningkatan kolaborasi riset dan pengabdian dosen dengan mitra internasional, industri, dan pemerintah; kebijakan institusi yang mendorong publikasi, paten, dan karya dosen untuk diapresiasi secara global; akses pendanaan riset dan pengabdian masyarakat yang lebih baik, baik internal maupun eksternal (hibah nasional/internasional); dukungan fasilitas dan ekosistem penelitian, dan peningkatan kompetensi dan jejaring dosen melalui pelatihan internasional dan partisipasi dalam konferensi global. Peningkatan capaian ini, juga memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya distribusi kinerja dosen yang belum merata; keterbatasan anggaran riset berkelanjutan; birokrasi dan regulasi administratif, dan kurangnya kolaborasi lintas disiplin.

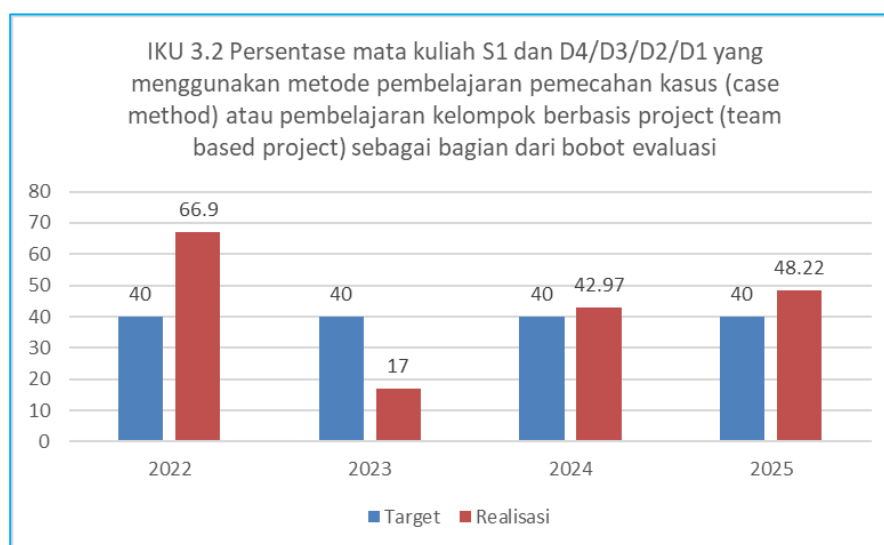


Gambar 1.6 Capaian IKU 3.1 (dalam rasio)

Secara umum, capaian kerja sama per program studi menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat signifikan dibandingkan target yang ditetapkan. Tahun 2022 realisasi 100 sudah melampaui target 40, Dimana capaian awal cukup baik, tahun 2023 terjadi lonjakan sangat tinggi 1.826,67 dibanding target 100, indikasi ekspansi kerja sama besar-besaran. Tahun 2024 mengalami penurunan 395,56, namun tetap di atas target 100. Pada tahun 2025 kembali meningkat 1.011,67 dan jauh melampaui target 100. Institusi memiliki kinerja kerja sama yang sangat baik, bahkan jauh melebihi target, meskipun terdapat ketidakstabilan capaian tiap tahun. Hal ini menunjukkan potensi besar, namun perlu penguatan pada aspek keberlanjutan dan konsistensi kerja sama.

Adapun faktor pendukung pencapaian ini antara lain kebijakan institusi yang pro terhadap kolaborasi yakni dukungan pimpinan dalam memperluas jejaring kerja sama nasional maupun internasional; tim khusus Kerjasama di bawah WD III dan Prodi serta Jurusan yang aktif menjalin dan mengelola MoU/MoA; kebutuhan implementasi

MBKM yang mendorong peningkatan kerja sama dengan DUDI dan perguruan tinggi lain; reputasi dan kepercayaan mitra; keterlibatan dosen dan program studi; dukungan pendanaan dan program hibah, dan jaringan alumni dna industri. Adapun faktor penghambat antara lain ketidakkonsistenan capaian tiap tahun, kerja sama belum semuanya implementatif, ketergantungan pada momen tertentu, keterbatasan monitoring dan evaluasi, beban administrasi dan birokrasi, dan kurangnya pemerataan antar prodi.

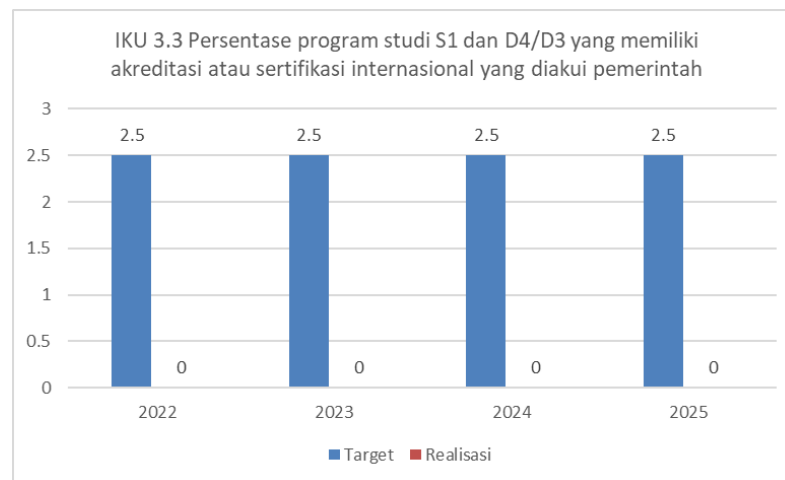


Gambar 1.7 Capaian IKU 3.2 (dalam persen)

Berdasarkan grafik di atas, data kinerja Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) tahun 2022–2025, penerapan *case method* dan *team-based project* menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 66,9%, jauh melampaui target 40%. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 17%, di bawah target. Tahun 2024 berhasil pulih melampaui target dengan 42,97%, dan tahun 2025 meningkat menjadi 48,22%, masih di atas target 40%.

Beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap capaian ini antara lain adanya kebijakan nasional yang mendorong pembelajaran berbasis kasus dan proyek, tersedianya platform pembelajaran daring yang memfasilitasi kolaborasi, serta komitmen dosen dalam menginternalisasi metode pembelajaran aktif ke dalam proses perkuliahan. Di sisi lain, faktor penghambat yang masih ditemukan adalah belum meratanya pemahaman dan keterampilan dosen dalam merancang metode tersebut, tingginya beban administrasi pembelajaran yang menyisakan sedikit waktu untuk inovasi, belum optimalnya skema pemberian apresiasi dan insentif berbasis kinerja bagi dosen yang menunjukkan konsistensi dalam pengembangan inovasi pembelajaran, serta terbatasnya ketersediaan studi kasus yang relevan dengan dunia industri vokasi.

Secara umum, Poltekba telah mampu melampaui target IKU 3.2 pada tahun 2022, 2024, dan 2025, namun diperlukan upaya sistematis untuk menjaga konsistensi dan memperluas cakupan penerapan *case method* dan *team-based project* di seluruh program studi. Penguatan kapasitas dosen, penyediaan insentif, serta pengembangan materi studi kasus yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi kunci utama peningkatan IKU ini ke depan.

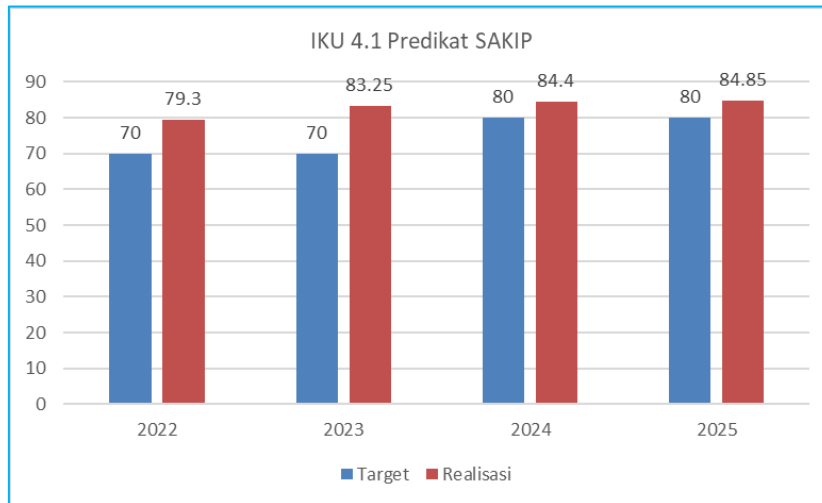


Gambar 1.8 Capaian IKU 3.3 (dalam persen)

Berdasarkan grafik di atas, hingga tahun 2025, realisasi IKU 3.3 di Politeknik Negeri Balikpapan masih berada pada angka 0%, meskipun target tahunan ditetapkan sebesar 2,5% sejak tahun 2022. Belum ada program studi di lingkungan Poltekba yang berhasil memperoleh akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Beberapa faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan antara lain adanya kesadaran pimpinan Poltekba tentang pentingnya akreditasi internasional, dukungan dari kementerian melalui program bantuan dan pendampingan, serta mulai terbangunnya kerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional. Namun, sejumlah faktor penghambat masih dominan, yaitu biaya akreditasi internasional yang relatif tinggi dan belum sepenuhnya tersedia dalam anggaran, dan kurikulum yang belum selaras dengan standar internasional.

IKU 3.3 merupakan tantangan terbesar Poltekba dalam upaya peningkatan daya saing global. Dengan capaian 0% hingga tahun 2025, diperlukan strategi khusus yang terencana dan terukur, seperti menyusun peta jalan akreditasi internasional, mengalokasikan anggaran khusus, membangun tim *task force* yang dibekali pelatihan internasional, serta memilih satu atau dua program studi unggulan sebagai percontohan.

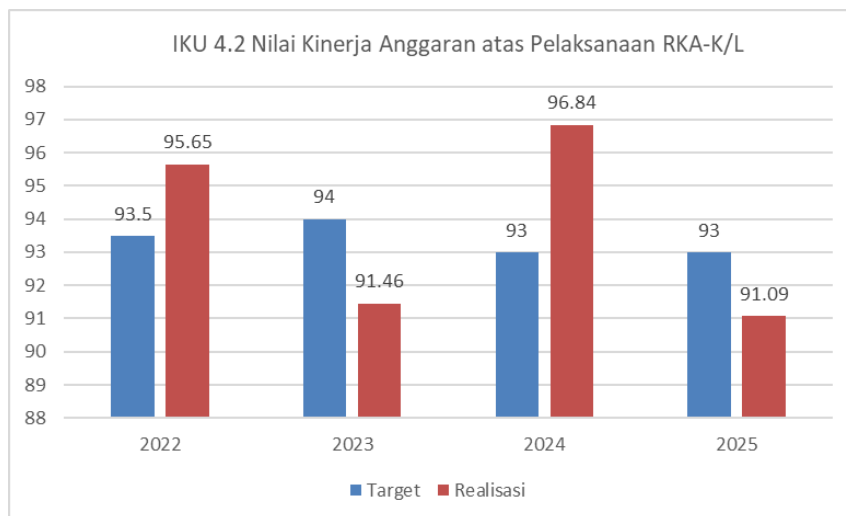


Gambar 1.9 Capaian IKU 4.1 (dalam rasio)

Berdasarkan grafik di atas, data kinerja Poltekba tahun 2022–2025, nilai SAKIP menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022, skor tercatat 79,3 dengan predikat BB (Cukup Baik). Tahun 2023 meningkat menjadi 83,25 dan berhasil meraih predikat A (Baik). Peningkatan berlanjut pada tahun 2024 menjadi 84,4 (predikat A), dan tahun 2025 mencapai 84,85 (predikat A). Capaian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja internal Poltekba telah berjalan dengan baik dan terus mengalami perbaikan, meskipun belum mencapai predikat tertinggi AA (Sangat Baik) dengan skor minimal 85.

Faktor pendukung yang berkontribusi terhadap capaian ini antara lain sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang semakin terstruktur, keterlibatan aktif seluruh unit kerja dalam penyusunan dan pelaporan kinerja, serta pemanfaatan aplikasi e-performance dan SAKIP berbasis elektronik. Di sisi lain, faktor penghambat yang masih perlu diatasi adalah masih adanya keterlambatan dalam pengumpulan bukti kinerja dari unit-unit di lingkungan Poltekba, belum optimalnya pemanfaatan data kinerja untuk perbaikan berkelanjutan, serta pemahaman yang belum sepenuhnya seragam tentang SAKIP di tingkat pelaksana. Poltekba telah menunjukkan tren positif dalam peningkatan predikat SAKIP dari BB menjadi A secara konsisten.

Dengan selisih yang sangat tipis menuju predikat AA (85), diperlukan upaya tambahan berupa penguatan disiplin pengumpulan bukti kinerja, optimalisasi *dashboard monitoring real-time*, serta peningkatan kapasitas pemahaman SAKIP di seluruh lini. Target tahun 2026 untuk mencapai predikat AA sangat realistis dan dapat diwujudkan dengan perbaikan terfokus pada faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi.

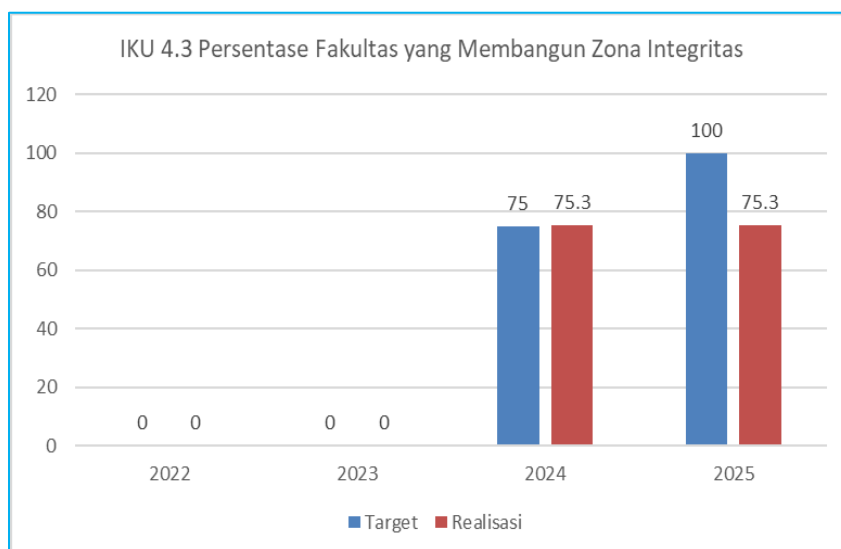


Gambar 1.10 Capaian IKU 4.2 (dalam rasio)

Berdasarkan grafik di atas, kinerja anggaran Poltekba tahun 2022–2025 menunjukkan pola fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 96,84 , melampaui target 93. Namun, pada tahun 2025 nilai kinerja anggaran menurun menjadi 91,09 , di bawah target 93. Tahun 2023 juga mencatat penurunan menjadi 91,46 dari target 94. Sementara itu, tahun 2022 mencapai 95,65 , melampaui target 93,5. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa kualitas perencanaan, penyerapan, dan pelaporan anggaran belum sepenuhnya stabil dan konsisten.

Faktor pendukung yang telah berjalan antara lain penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kompetensi pengelola keuangan melalui pelatihan rutin, serta penggunaan aplikasi yang terintegrasi. Adapun faktor penghambat yang menyebabkan fluktuasi adalah masih adanya kendala teknis dalam pencairan dan pengadaan barang/jasa yang mempengaruhi realisasi anggaran, perencanaan kebutuhan yang belum detail sehingga sering terjadi revisi anggaran, serta koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan pelaksana kegiatan yang masih perlu ditingkatkan.

Meskipun Poltekba beberapa kali berhasil melampaui target kinerja anggaran, fluktuasi yang terjadi menunjukkan perlunya penguatan kualitas perencanaan sejak awal tahun anggaran. Peningkatan koordinasi antar unit, penyusunan jadwal pelaksanaan yang lebih realistis, serta penguatan kapasitas teknis pengelola keuangan menjadi kunci untuk mencapai kinerja anggaran yang stabil di atas target secara berkelanjutan.



Gambar 1.11 Capaian IKU 4.3 (dalam persen)

Berdasarkan grafik di atas, target pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Poltekba meningkat dari 75% pada tahun 2024 menjadi 100% pada tahun 2025. Realisasi tahun 2024 mencapai 75,3% , sesuai dengan target. Namun, realisasi tahun 2025 stagnan di angka 75,3% , tidak mencapai target 100% yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ZI belum merata di seluruh Jurusan dan terjadi hambatan dalam akselerasi pencapaian target.

Faktor pendukung yang telah tersedia antara lain, adanya komitmen dari Rektor dan pimpinan jurusan untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta sosialisasi nilai-nilai integritas yang dilakukan secara berkala. Adapun faktor penghambat utama adalah belum semua jurusan memiliki komitmen dan kesiapan yang sama terhadap pembangunan ZI, minimnya tenaga pendamping dan asesor internal ZI yang kompeten, serta kurangnya pemahaman tentang indikator WBK/WBBM di tingkat jurusan dan unit kerja.

Target 100% jurusan membangun Zona Integritas pada tahun 2025 belum tercapai, dengan capaian hanya 75,3% atau stagnan dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai target 100% ke depan, diperlukan strategi pendampingan intensif, penambahan asesor internal ZI, serta penguatan insentif dan sanksi yang jelas terkait komitmen pembangunan ZI. Tanpa intervensi tersebut, target universalitas ZI di seluruh Jurusan sulit terwujud.

Penyusunan Renstra Poltekba 2025-2029 mengintegrasikan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan (DUDI, Pemerintah, dan Masyarakat) terkait pemenuhan kebutuhan barang, layana publik, dan regulasi. Berikut adalah poin-poin aspirasi dan isu strategis yang dihimpun:

1. Dukungan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): Poltekba diharapkan menjadi institusi penopang utama yang menghasilkan lulusan unggul siap kerja untuk kebutuhan IKN. Hal ini menuntut adanya diferensiasi misi yang selaras dengan profil kebutuhan SDM di kawasan IKN.
2. Sinergi DUDI dan Teaching Factory (TEFA): Kebutuhan akan keterlibatan industri yang lebih dalam pada penyusunan kurikulum, pengembangan smart campus, peningkatan sertifikasi keahlian mahasiswa, serta partisipasi aktif dalam penyerapan lulusan melalui riset terapan yang solutif.
3. Transformasi Digital: Tuntutan percepatan adaptasi teknologi informasi pada layanan akademik dan tata kelola melalui sistem informasi terintegrasi (SIA, SIKERMA, SISTER) serta masifikasi metode blended learning.
4. Internasionalisasi dan Daya Saing Global: Tuntutan peningkatan reputasi melalui akreditasi internasional prodi dan perluasan jejaring kemitraan global guna menjawab tantangan kompetisi talenta lintas negara.
5. Aksesibilitas dan Inklusivitas: Harapan masyarakat terhadap pembukaan prodi baru yang relevan, penguatan program RPL bagi lulusan SMK/daerah tertinggal, serta pengembangan minat bakat mahasiswa yang lebih komprehensif.
6. Reformasi Tata Kelola & Zona Integritas: Penguatan internal untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pencapaian predikat SAKIP A dan pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM).
7. Keberlanjutan Lingkungan dan Transisi Energi: Aspirasi mengenai integrasi prinsip ekonomi hijau (green economy) dan transisi energi dalam kurikulum serta riset terapan, sejalan dengan visi pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan.

Dengan mempertimbangkan capaian, kesenjangan, aspirasi masyarakat, dan isu strategis tersebut, Renstra Poltekba 2025-2029 dirancang sebagai panduan strategis untuk meningkatkan daya saing global, memperkuat kolaborasi lintas sektor, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya berbasis prinsip satuan kerja, serta memastikan inklusivitas dan pemerataan akses pendidikan vokasi. Seluruh strategi dan program yang tertuang di dalamnya disusun untuk merespons dinamika perubahan yang cepat, mempertahankan capaian positif, dan mengatasi kesenjangan yang masih ada, guna mencapai visi institusi secara berkelanjutan.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### POTENSI

Sebagai institusi Pendidikan tinggi vokasi negeri satu-satunya yang terletak di Kota Balikpapan, berorientasi pada kebutuhan industri. Poltekba mempunyai peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Poltekba berkomitmen tidak hanya sebagai pusat pendidikan tapi juga sebagai mitra industri dalam riset dan pengembangan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan pendirian program studi yang mendukung pada pencapaian prioritas pembangunan Kota Balikpapan khususnya dan Kalimantan Timur dan IKN pada umumnya.

Tabel 1.1. Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan dan Program Studi Poltekba yang relevan

No	Prioritas Pembangunan	Prodi yang menunjang
1	Transformasi Birokrasi	
2	Peningkatan Layanan Dasar	
3	Penanggungan Stunting	Prodi Tata Boga
4	Pengendalian Banjir	Prodi Teknik Sipil, Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air, Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas, Prodi Rekayasa Konstruksi Jalan & Jembatan, Prodi Listrik, dan Prodi Elektronika
5	Kedaulatan Air Bersih	
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sosial	
7	Pengembangan Destinasi MICE dan Wisata	Pengelolaan Perhotelan dan Prodi Tata Boga
8	Penguatan ekonomi kreatif dan inovasi	Prodi Perbankan & Keuangan Digital dan Akutansi Perpajakan, Prodi Alat Berat, dan Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur
9	Pengembangan kota ramah anak.	

Pengembangan Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur sebagai kawasan perdagangan menunjukkan dinamika industrialisasi yang signifikan. Kota Balikpapan yang mempunyai sektor unggulan di bidang industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan logistik serta merupakan pusat ekonomi pada

bidang minyak dan gas bumi, industri pengolahan, jasa dan logistik, serta Kota Balikpapan masuk dalam strategi Tiga Kota dalam Rencana Induk Pengembangan IKN.

Tabel 1.2. Strategi Tiga Kota dalam Rencana Induk IKN

Kota	Peran
IKN sebagai saraf	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pusat pemerintahan baru dan inovasi hijau.</li> <li>▪ Basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, nutraceutical, dan energi baru terbarukan (EBT).</li> <li>▪ Basis untuk <i>smart city</i> dan layanan digital, pendidikan abad ke-21 serta pariwisata kota, bisnis dan kesehatan</li> </ul>
Samarinda sebagai jantung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menstransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan.</li> <li>▪ Dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur.</li> </ul>
Balikpapan sebagai otot	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor.</li> <li>▪ Memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional.</li> <li>▪ Menampung kluster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas ulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.</li> </ul>

Sumber: Rencana Induk IKN, Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Dalam kondisi ini tentunya membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan sektor industri dan Poltekba mempunyai posisi yang sangat strategis. Dengan portofolio program studi yang telah dan akan dibuka selaras dengan arah pertumbuhan industri di Kawasan Kota Balikpapan dan menunjang pertumbuhan IKN.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Poltekba, maka dilakukan analisis potensi berdasarkan Analisis PESTLE yang dikelompokkan menjadi enam kategori yaitu: (1) *Political*, (2) *Economic*, (3) *Sociological*, (4) *Technological*, (5) *Legal* dan (6) *Environmental*.

Berikut sejumlah isu strategis yang dapat menjadi potensi Poltekba adalah sebagai berikut:

1. **Political**

**Nasional:**

Terdapat beberapa perubahan kebijakan domestik yang cepat agar dapat menyesuaikan ketegangan persaingan antar negara yang diamplifikasi dengan munculnya poros kekuasaan baru. Negara-negara berkembang, yang secara kolektif berkontribusi sebesar 71% persen terhadap dinamika ini, memainkan peran penting dalam membentuk Kembali peran Kerjasama internasional.

**Lokal:**

Upaya peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dan reformasi di Kota Balikpapan masih belum optimal. Penilaian capaian ini dapat ditinjau melalui aspek sumber daya manusia (SDM), sinkronisasi regulasi pusat-derah, serta sarana dan prasarana. Terkait aspek sumber daya manusia, proses rekrutmen Pemerintah Kota Balikpapan hanya terbatas pada kandidat ASN saja.

2. **Economic**

**Nasional:**

- 1) Indonesia sebagai negara maritim memiliki banyak potensi dari sektor kelautan termasuk ekonomi biru yang menciptakan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Indonesia dengan potensi yang melimpah sampai saat ini belum dapat mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki sehingga kontribusi sektor kelautan pada PDB hanya sebesar 7,60%. Beberapa hal yang mempengaruhi optimalisasi dari sektor kelautan seperti belum optimalnya proses manajemen wilayah pengelolaan perikanan perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, terbatasnya diversifikasi industri yang memanfaatkan kekayaan laut, serta minimnya pengembangan riset dan teknologi kelautan.
- 2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi selama ini berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, yakni mencapai 99,99% untuk UMKM dan 96,92% untuk Koperasi. Namun penyerapan tenaga kerja yang besar tidak serta merta linier dengan kontribusi UMKM dan Koperasi PDB.

**Lokal:**

1. Perekonomian daerah Kota Balikpapan masih didominasi oleh sektor pengolahan. Namun peran sektor-sektor lain terhadap peningkatan perekonomian Kota Balikpapan juga tidak kalah penting, salah satunya adalah UMKM. Saat ini jumlah UMKM di Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan setiap tahun dengan total omset yang dimiliki sekitar 1,5 triliun. Kondisi ini menunjukkan sektor UMKM memiliki kontribusi yang cukup penting dalam perekonomian daerah. Namun UMKM di Kota Balikpapan belum diimbangi daya saing UMKM. Kondisi ini ditandai dengan jumlah UMKM yang telah melakukan ekspor produk masih sedikit jika dibandingkan Kota Samarinda.

**3. Sociological****Nasional:**

- 1) Megatrend yang saat ini juga terjadi adalah pertumbuhan demografi kelas menengah yang sedang berkembang. Tren ini ditandai dengan peningkatan jumlah individu yang mencapai status kelas menengah dan atas yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni mencapai 90% dari populasi global atau sekitar 8,8 milyar manusia. Tren ini menandakan perubahan signifikan dalam dinamika sosio-ekonomi global dan mempunyai implikasi yang luas. Ketika kelas menengah bertambah, pola konsumsi dan kebutuhan juga meningkat, sehingga permintaan terhadap sumber daya, lapangan kerja, dan barang-barang primer meningkat. Mayoritas kelas menengah dihadapkan dengan tanggung jawabnya sebagai generasi sandwich, yaitu mereka memiliki peran ganda dalam memberikan dukungan emosional, finansial, dan terkadang fisik kepada orang tua dan anak.
- 2) Rata-rata tingkat produktivitas Indonesia yang dilihat melalui indikator *Total Factory Productivity* (TFP) selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66 poin. Rendahnya angka produktivitas di Indonesia disebabkan oleh banyak hal seperti kualitas sumber daya manusia yang kurang mumpuni, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, tertinggalnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan belum optimalnya sistem kelembagaan meliputi penghargaan dan hukuman, serta diperparah dengan lemahnya kepastian hukum.

**Lokal:**

- 1) Kondisi ketenagakerjaan di Kota Balikpapan menunjukkan bahwa persentase Masyarakat yang menganggur tergolong tinggi yaitu mencapai 6.90% pada

tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan memang menunjukkan tren menurun selama periode 2011 – 2022. Namun angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran, baik di level Propinsi Kalimantan Timur sebesar 5,71%, maupun level nasional sebesar 5,86% pada periode yang sama. Tingginya tingkat pengangguran di Kota Balikpapan disebabkan oleh kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Angka tersebut didominasi oleh lulusan SMA sederajat yang mencapai 48,86%.

- 2) Karakteristik Kota Balikpapan sebagai Kawasan perkotaan yang didominasi lahan terbangun berimplikasi pada berkurangnya luasan lahan produksi bahan pangan, sehingga akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan pangan pada masa depan. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan adanya ancaman krisis iklim dan Kota Balikpapan yang hanya sebesar 4,17% dari luas keseluruhan pemanfaatan lahan dan potensi pertanian tanaman padi yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan termasuk dalam kategori skala kecil yakni sebesar 1.567,67 Ha, maka ketahanan pangan di Kota Balikpapan belum optimal.
- 3) Selama periode Pembangunan sebelumnya pelayanan Kesehatan di Kota Balikpapan terus mengalami perubahan. Kota Balikpapan jumlah fasilitas Kesehatan yang cukup memadai baik fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Namun demikian, pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama dari segi pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dukungan tata Kelola, manajemen kesehatan, pengembangan layanan unggulan dan peningkatan upaya preventif dan promotif tentang kesehatan kepada masyarakat.

#### **4. Technological**

##### **Nasional:**

- 1) Kapasitas ilmu pengetahuan dan inovasi (IPTEKIN) merupakan salah satu hal krusial untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. IPTEKIN berperan melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun IPTEKIN di Indonesia selama ini terhambat oleh setidaknya dua hal, yakni rendahnya komitmen pemerintah terkait anggaran, ditambah dengan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Ekosistem riset dan inovasi di Indonesia ikut berkontribusi dalam melemahnya IPTEKIN dan riset karena cenderung kurang kondusif. Hal itu tampak dari lemahnya Kerjasama Lembaga riset dan industry, baik secara

- domestik maupun internasional. Kurangnya kerjasama pada ranah riset dan industri, juga sedikit banyak dikarenakan tingkat kesadaran ilmiah di Masyarakat yang masih lemah, sehingga keinginan untuk melakukan penelitian juga cenderung rendah.
- 2) Deindustrialisasi merupakan kondisi industri yang tidak dapat lagi berperan sebagai basis pendorong utama perekonomian di suatu negara. Deindustrialisasi ditandai dengan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang terus melemah. Terdapat beberapa penyebab semakin melemahnya kontribusi manufaktur terhadap PDB, yakni adanya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi; keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, serta tingginya biaya ekonomi akibat logistik dan tingkat suku bunga.
  - 3) Indonesia masih mengalami keterbatasan secara kapasitas dan kapabilitas dari sisi penawaran, permintaan, dan ekosistem digital. Keterbatasan dari sisi penawaran selama ini terkait pada infrastruktur yang belum memadai seperti terbatasnya kapasitas data center dan rendahnya penerapan kebijakan teknologi, informasi dan teknologi.

**Lokal:**

Kota Balikpapan memiliki sebuah konsep *smart city* atau kota cerdas yang mengusung visi Balikpapan "*Balikpapan the most livable city*" sebuah kota yang layak huni dengan tingkat kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan *smart city* Kota Balikpapan Tahun 2022 program *smart city* Kota Balikpapan perlu memaksimalkan rencana aksi program *smart city* yang tertuang dalam *master plan smart city* dengan dukungan kebijakan atau kelembagaan. Pembangunan infrastruktur, aplikasi pendukung, dan penguatan literasi membutuhkan ketersediaan teknologi yang kuat, sedangkan kondisi teknologi di Balikpapan masih tergolong belum terlalu kuat untuk dapat membangun *smart city*.

## 5. Legal

### Nasional:

- 1) Sistem hukum yang dijalankan di Indonesia belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dengan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, beberapa masalah strategis di bidang hukum yang harus dibenahi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 meliputi belum optimalnya pemulihan aset tindak pidana, masih tingginya potensi pelanggaran HAM, serta lemahnya pengawasan di internal maupun eksternal institusi penegak hukum.
- 2) Demokratisasi secara harfiah dimaknai sebagai suatu proses dalam sistem suatu negeri menuju bentuk demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi ternyata belum mampu merealisasikan dengan optimal.

## 6. Environmental

### Nasional:

- 1) Dalam beberapa tahun terakhir, isu iklim semakin menguat disebabkan oleh peningkatan suhu global, peningkatan kejadian ekstrem dan bencana alam. Fenomena ini sangat penting untuk dipertimbangkan secara jangka panjang mengingat dampak iklim yang sudah terjadi dan secara langsung dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidup. Gangguan yang diakibatkan pada sistem cuaca dan meningkatnya frekuensi kejadian ekstrem diperkirakan akan mengganggu produksi pangan global, memperburuk kelangkaan air, meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam, serta mengganggu kenyamanan berkehidupan. Sebagaimana yang dilakukan pemerintahan dunia, isu perubahan iklim perlu diintegrasikan dalam perencanaan jangka panjang.
- 2) Meningkatnya persaingan dalam mendapatkan sumber daya alam, yang dipicu oleh meluasnya pengaruh perekonomian Asia, merupakan megatrend penting karena implikasinya yang cukup besar. Tren ini berakar pada meningkatnya permintaan komoditas penting, yang didorong oleh pesatnya urbanisasi, industrialisasi dan pertumbuhan populasi di Asia.

### Lokal:

- 1) Keberagaman daya tarik wisata di Kota Balikpapan belum dikembangkan secara optimal sebagai atraksi wisata bagi wisatawan yang Sebagian besar melakukan perjalanannya untuk kegiatan *meeting, incentive, conference, and exhibition* (MICE). Selama ini beberapa wisatawan yang datang melalui

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman memiliki motivasi kunjungan untuk transit dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan Kota Balikpapan mengalami tren peningkatan. Kondisi ini perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan yang telah menjadi unggulan Kota Balikpapan.

- 2) Penyediaan air baku di Kota Balikpapan belum optimal. Hal ini terjadi karena kurangnya sumber air yang ada di Kota Balikpapan. Sumber eksisting saat ini mencakup embung teritip, embung air raden, embung manggar, dan sumur-sumur dalam. Ketersediaan sumber-sumber air tersebut, belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan air Masyarakat Kota Balikpapan. Masih terdapat GAP antara ketersediaan air baku dengan kebutuhan air baku oleh Masyarakat Kota Balikpapan. Total penyediaan air baku Kota Balikpapan hingga Tahun 2020 adalah 1.570 liter/detik. Adapun total keseluruhan sebesar 2.248 liter/detik, sehingga masih terdapat kekurangan air baku sebesar 678 liter/detik.
- 3) Banjir menjadi salah satu permasalahan penting untuk ditangani di Kota Balikpapan. Berdasarkan baseline titik banjir yang disusun pada Tahun 2020, titik banjir mengalami peningkatan menjadi 88 titik, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 30 titik. Selain itu pada Tahun 2018-2020, luasan genangan banjir pada DAS Klandasan dan DAS Sepinggian mengalami kinerja yang stagnan atau tidak mengalami penurunan luasan genangan banjir. Berdasarkan analisis data di Kota Balikpapan, kondisi ini dipengaruhi oleh aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi sistem drainase yang belum terintegrasi secara baik dari pemukiman di kelurahan hingga perkotaan dan ketersediaan infrastruktur pengendali banjir yang belum optimal. Sementara aspek non teknis diantaranya kesadaran masyarakat, kesesuaian, dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta penegakan hukum.
- 4) Penanganan degradasi lingkungan yang belum optimal di Kota Balikpapan merupakan tantangan yang memerlukan perhatian serius dan Tindakan berkelanjutan. Tantangan tersebut dapat dilihat dari kinerja komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu kualitas udara, air, dan lahan. Dari ketiga indikator pembentuk IKLH Kota Balikpapan, indeks kualitas udara dan air memiliki capaian yang fluktuatif dari Tahun 2015 hingga 2020. Capaian indeks kualitas air didominasi berkategori "kurang" dari Tahun 2015-2020. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan nilai sekaligus predikat kualitas air yang disebabkan karena terjadi kontaminasi zat pencemar terhadap tubuh air di Kota Balikpapan.

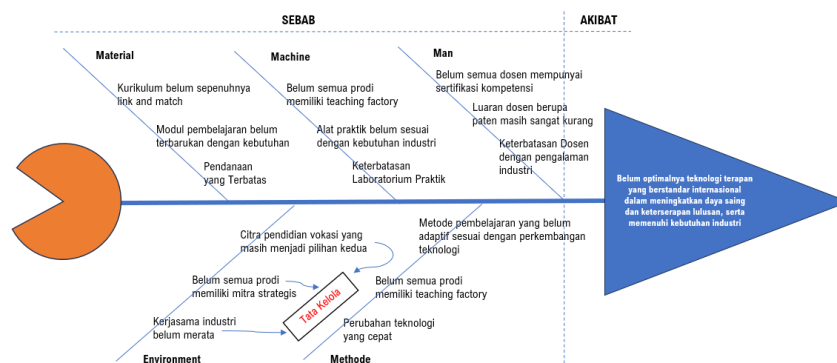
- 5) Inklusifitas menjadi salah satu isu yang kerap mencuat khususnya di wilayah perkotaan. Penyediaan pelayanan public yang inklusif perlu menjadi focus pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini berkaitan dengan hak Masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang harus dipenuhi secara menyeluruh. Pelayanan public yang inklusif dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok difabel, lansia dan anak seperti jalur khusus difabel, penyediaan ruang khusus bagi anak, dan ruang bagi ibu menyusui.

Analisis PESTLE ini membantu Poltekba dalam menyusun strategi berdasarkan tren eksternal agar tetap relevan dan kompetitif pada periode 2025-2029. Implikasi dari analisis PESTLE adalah sebagai berikut:

1. Poltekba harus selalu menyesuaikan perubahan kebijakan nasional dan global. (Political)
2. Poltekba perlu mempererat kerjasama dengan industri dan masyarakat untuk meningkatkan daya saing lulusan. (Economic)
3. Poltekba perlu mengembangkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan generasi baru dan membuka program studi baru yang baru yang kedepannya mampu menjawab permasalahan secara sosial. (Sociological)
4. Poltekba harus bisa menggunakan teknologi seperti IoT, AI dan *hybrid learning* untuk meningkatkan mutu pendidikan. (Technological)
5. Poltekba harus memastikan kepatuhannya terhadap regulasi pendidikan dan ketenagakerjaan (Legal).
6. Poltekba harus bisa mengintegrasikan prinsip *sustainable development* dalam pengembangan kurikulum dan pendidikan. (Environmental)

## PERMASALAHAN

Permasalahan di Poltekba dianalisis melalui Diagram Fishbond yang tergambar sebagai berikut:



Gambar 1.1. Diagram Fishbone

Dari Diagram Fishbone diatas dapat diuraikan bahwa permasalahan di Poltekba terdiri dari beberapa kategori diantaranya:

**1. Man (Sumber daya manusia)**

- Keterbatasan dosen yang mempunyai pengalaman industri.
- Luaran dosen berupa paten masih sangat kurang.
- Belum semua dosen mempunyai sertifikasi kompetensi.

**2. Machine (Peralatan)**

- Keterbatasan laboratorium praktik. Kondisi ini disebabkan karena bangunan gedung jurusan yang masih terbatas sehingga alokasi ruangan untuk laboratorium pada masing-masing jurusan juga terbatas.
- Masih terdapat peralatan laboratorium/workshop sering belum sesuai dengan standar industri terbaru. Hal ini disebabkan terkadang pengadaan peralatan pada masing-masing program studi belum sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga peralatan yang dibeli belum mampu menjawab permasalahan industri.
- Belum semua program studi mempunyai *teaching factory*

**3. Material (Materi Pembelajaran & Anggaran)**

- Pendanaan terbatas. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran yang telah dilakukan secara terpusat.
- Masih minimnya modul pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri.
- Belum semua kurikulum program studi yang mengakomodir kebutuhan link and match dengan industri.

**4. Metode (Metode/cara pembelajaran)**

- Perubahan Teknologi yang Cepat, sehingga kurikulum sering tertinggal dibanding perkembangan teknologi di industri.
- Belum semua program studi mempunyai *teaching factory*.
- Masih banyak dosen yang belum menggunakan metode pembelajaran yang adaptif.

**5. Environment (Lingkungan pembelajaran)**

- Kerja sama dengan industri belum merata.
- belum semua program studi memiliki mitra strategis.
- Citra Pendidikan Vokasi. Masih adanya stigma bahwa pendidikan vokasi merupakan pilihan kedua dibanding akademik.

Dari uraian diagram fishbone diatas, dapat diuraikan analisis SWOT sebagai berikut:

### 1. **Strengths (Kekuatan)**

Faktor internal positif yang sudah dimiliki:

- Orientasi pendidikan berbasis keterampilan praktis
- Potensi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
- Penguatan kurikulum menuju *Outcome Based Education (OBE)*
- Adanya program magang dan praktik kerja
- Dukungan awal terhadap pengembangan *soft skills* mahasiswa

### 2. **Weaknesses (Kelemahan)**

Faktor internal yang menjadi hambatan:

- Kompetensi dosen belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri
- Minimnya dosen dengan pengalaman praktis industri
- Kurikulum belum sepenuhnya *link and match*
- Keterbatasan sarana dan prasarana (alat praktik/lab)
- Modul pembelajaran belum update
- Sistem manajemen dan evaluasi belum optimal
- Kerja sama industri masih terbatas

### 3. **Opportunities (Peluang)**

Faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan:

- Tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil di Kota Balikpapan dan wilayah sekitar
- Dukungan pemerintah terhadap pendidikan vokasi
- Peluang kerja sama strategis dengan industri
- Perkembangan teknologi digital dan industri 4.0
- Program sertifikasi kompetensi
- Pengembangan *teaching factory* dan *project-based learning*

### 4. **Threats (Ancaman)**

Faktor eksternal yang berpotensi menghambat:

- Perubahan teknologi yang sangat cepat
- Persaingan tenaga kerja yang semakin ketat
- Ketidaksesuaian kebutuhan industri yang dinamis
- Stigma negatif terhadap pendidikan vokasi
- Kompetisi dengan perguruan tinggi lain

## Matriks Strategi SWOT

### A. Strategi SO (*Strength–Opportunity*)

Memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang:

- Mengembangkan kurikulum berbasis industri dan luaran (*Outcome based*)
- Memperluas kerja sama dengan DUDI untuk magang & rekrutmen
- Mengoptimalkan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*)

### B. Strategi WO (*Weakness–Opportunity*)

Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang:

- Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan & sertifikasi
- Modernisasi sarana praktik melalui kerja sama industri/pemerintah
- Update kurikulum dan bahan ajar berbasis kebutuhan industri

### C. Strategi ST (*Strength–Threat*)

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman:

- Menghasilkan lulusan siap kerja untuk menghadapi persaingan tinggi
- Menyesuaikan kurikulum secara berkala terhadap perkembangan teknologi
- Memperkuat branding vokasi berbasis keunggulan praktis

### D. Strategi WT (*Weakness–Threat*)

Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman:

- Perbaiki tata kelola dan sistem evaluasi (Monev)
- Penguatan kerja sama industri untuk mengurangi *mismatch* lulusan
- Peningkatan kualitas pembelajaran agar tidak tertinggal teknologi

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **2.1. VISI**

Menjadi institusi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, bermartabat, serta diakui dunia dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri dan masyarakat.

#### **2.2. MISI**

Rumusan Misi Politeknik Negeri Balikpapan yang telah disepakati bersama adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa yang bersifat menyenangkan, inklusif, kolaboratif, efektif dan efisien;
- 2) Mendorong dan meningkatkan mutu penelitian terapan serta pengabdian kepada masyarakat (PPM) yang berdampak, serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset yang inovatif dan solutif guna menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia industri;
- 3) Memperkuat dan meningkatkan kualitas kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai kebutuhan dunia kerja;
- 4) Menyelenggarakan manajemen kelembagaan yang efisien, produktif, akuntabel, dan transparan serta ber-keadilan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan prima dan meningkatkan kepercayaan publik.

#### **2.3. TUJUAN**

Sebagai institusi pendidikan vokasi, Poltekba menetapkan tujuan strategis sebagai arah dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar di bidangnya, kemampuan mengembangkan teknologi terapan; dan kemampuan berwirausaha.
- 2) Menghasilkan produk inovatif yang dibutuhkan oleh masyarakat dan industri.
- 3) Terjalinya kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi;

- 4) Mewujudkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan guna memberikan pelayanan prima serta meningkatkan kepercayaan publik.

#### **2.4. SASARAN**

Poltekba menetapkan sasaran sebagai arah dalam pencapaian tridharma perguruan tinggi yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya mutu dan relevansi pembelajaran;
- 2) Meningkatnya kapasitas luaran penelitian dan PPM yang berdampak pada kebutuhan Masyarakat dan dunia industri;
- 3) Meningkatnya kapasitas talenta dosen dan tenaga kependidikan;
- 4) Meningkatnya manajemen kelembagaan efisien, produktif, akuntabel, dan transparan serta ber-keadilan.

## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks dan tuntutan publik yang semakin meningkat, penetapan arah kebijakan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Selama periode 2025-2029 arah kebijakan kementerian tidak lagi sekadar berfokus pada pemenuhan administratif pendidikan, melainkan bergeser menuju pembentukan ekosistem yang mengintegrasikan pendidikan tinggi, riset mendalam, dan penguasaan teknologi mutakhir. Fokus utama adalah mencetak sumber daya manusia yang kompetitif secara global namun tetap berakar pada kebutuhan pembangunan nasional.

Dalam menyusun strategi untuk Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tidak lagi hanya berfokus pada proses pendidikan secara terisolasi. Strategi yang diusung lebih bersifat ekosistemik, di mana perguruan tinggi diposisikan sebagai jantung dari kemajuan ekonomi berbasis pengetahuan.

Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Berkembangnya <i>Science, Technology, Engineering, and Mathematic</i> (STEM) di Pendidikan Tinggi	Mendorong perguruan tinggi untuk membuka dan mengembangkan program studi di bidang STEM dengan kualitas unggul, serta memperkuat integrasi kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global dan kebutuhan industri
2.	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan SDM Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pendanaan pendidikan gelar dan beasiswa seperti optimalisasi program PMDSU (Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul).</li> <li>2. Memfasilitasi program beasiswa pendidikan doktor dalam dan luar negeri, percepatan studi S3 melalui skema khusus, serta kerja sama internasional untuk mempercepat</li> </ol>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<p>peningkatan kualifikasi akademik dosen, terutama pada bidang-bidang strategis yang sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mendorong dosen berkualifikasi Doktor (S3) untuk mengimplementasikan mobilitas SDM, seperti mobilitas antarperguruan tinggi dan penempatan di industri.</li> <li>4. Kerja sama pendidikan tinggi dengan mitra internasional strategis yang berorientasi pada peningkatan mutu SDM serta pengembangan <i>joint degree</i> atau <i>double-degree programs</i> dengan universitas terkemuka dunia.</li> </ol>
3.	Meningkatkan kompetensi dan tata kelola SDM Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat program pendampingan karier akademik, pelatihan penulisan publikasi internasional, dan fasilitasi kegiatan riset kolaboratif yang menghasilkan luaran berkualitas tinggi untuk percepatan kenaikan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen.</li> <li>2. Melakukan optimalisasi Program Sertifikasi Pendidik Dosen (Serdos), pengembangan sistem sertifikasi berbasis digital, serta integrasi sertifikasi pendidik dengan peningkatan keterampilan pedagogi <i>modern (blended learning, hybrid learning, dan digitalisasi pembelajaran)</i>.</li> <li>3. Membekali dosen untuk dapat beradaptasi terhadap disrupsi digital melalui peningkatan literasi digital dan teknologi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.</li> </ol>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memfasilitasi skema insentif dan penghargaan kepada dosen dan tendik berbasis kinerja.</li> <li>5. Mendorong pemberdayaan tendik untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.</li> </ol>
4.	Meningkatkan SDM Pendidikan Tinggi yang Memiliki Kompetensi Tingkat Internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengembangan kurikulum, akreditasi, dan program pendidikan yang memenuhi atau melampaui standar internasional.</li> <li>2. Mengembangkan program pertukaran mahasiswa, dosen tamu internasional, dan kolaborasi penelitian global untuk memperkuat jejaring akademik internasional.</li> <li>3. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi serta peningkatan sitasi global.</li> <li>4. Mendukung perguruan tinggi dan institusi riset Indonesia untuk masuk ke dalam peringkat internasional (<i>QS World University Rankings, THE Impact Rankings, dll.</i>) melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan inovasi pembelajaran.</li> <li>5. Mengembangkan program strategis (seperti Manajemen Talenta Nasional) untuk memfasilitasi dosen, peneliti, dan mahasiswa agar meraih pengakuan internasional, serta meningkatkan mobilitas akademik lintas negara.</li> <li>6. Meningkatnya mahasiswa yang meraih prestasi di tingkat nasional atau internasional.</li> </ol>
5.	Meningkatkan mutu dan relevansi pembelajaran pada perguruan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya lulusan pendidikan tinggi yang memiliki keahlian menengah-tinggi.</li> <li>2. Meningkatnya relevansi bidang STEAM di perguruan tinggi.</li> </ol>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatnya mutu dan relevansi SDM kesehatan melalui sistem kesehatan akademik.</li> <li>4. Menguatnya mutu profesi guru.</li> <li>5. Menguatnya mutu lembaga pelaksana pendidikan tenaga kependidikan.</li> <li>6. Meningkatnya mutu dan relevansi pembelajaran pada perguruan tinggi.</li> </ul>
6.	Meningkatkan mahasiswa yang meraih prestasi di tingkat nasional atau internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan fasilitasi dan dukungan bagi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi di bidang sains, riset, teknologi, dan inovasi.</li> <li>2. Memberikan fasilitasi dan dukungan bagi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi di bidang seni, budaya, dan literasi.</li> <li>3. Memberikan fasilitasi dan dukungan bagi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi di bidang olahraga.</li> <li>4. Memberikan fasilitasi dan dukungan bagi mahasiswa untuk mengembangkan prestasi di bidang vokasi dan kewirausahaan.</li> </ul>
7.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di perguruan tinggi vokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan modernisasi laboratorium pembelajaran dan riset di perguruan tinggi vokasi, termasuk pengembangan <i>teaching factory</i> sesuai standar industri.</li> <li>2. Meningkatkan jumlah perguruan tinggi vokasi yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pembelajaran maupun sarana dan prasarana perkantoran dari berbagai skema pendanaan seperti PNBP/BLU Vokasi, BOPTN Vokasi, SBSN, PHLN, maupun pendanaan inovatif lainnya.</li> </ul>
8.	Meningkatkan Mutu dan Relevansi Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong peningkatan jumlah mahasiswa pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti dan lulus uji</li> </ul>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	dengan Kebutuhan Dunia Kerja	<p>kompetensi melalui fasilitasi yang memadai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memperkuat transformasi kelembagaan politeknik untuk meningkatkan adaptabilitas, memperluas otonomi, dan memastikan relevansi pendidikan vokasi terhadap kebutuhan industri dan masyarakat, sekaligus mendorong perannya sebagai simpul penggerak pembangunan ekonomi wilayah melalui kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha lokal, dan lembaga riset daerah.</li> <li>3. Merevitalisasi kurikulum berbasis industri melalui pendekatan <i>link and match</i> yang berorientasi langsung pada kebutuhan pasar kerja, baik nasional maupun global.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga pengajar vokasi melalui program pelatihan, sertifikasi industri, dan kolaborasi aktif dengan mitra internasional.</li> </ol>
9.	Meningkatnya kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan retensi talenta: insentif karier, jejaring riset, dan kolaborasi internasional</li> <li>2. Mengatur dan melakukan pemantauan ketat masa studi, fasilitasi program percepatan studi</li> <li>3. Mengidentifikasi program studi tertentu yang masa studinya cenderung lama untuk program penyiapan dosen sebelum lanjut studi</li> <li>4. Diversifikasi sumber pendanaan riset, optimalisasi penggunaan dana yang ada</li> <li>5. Penguatan sosialisasi kode etik dan sistem penjaminan mutu riset, disertai penerapan sistem deteksi plagiarisme</li> </ol>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		6. Pendekatan komunikasi dan edukasi pada masyarakat
10.	Meningkatkan Kontribusi Perguruan Tinggi Berdasarkan Keunggulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola penelitian, inovasi, dan pengabdian masyarakat melalui berbagai skema bantuan pendanaan seperti Pendanaan Penelitian <i>Competitive Fund</i>, Pendanaan Pengabdian Masyarakat <i>Competitive Fund</i>, dan Pendanaan Penelitian Kerja Sama Luar Negeri, PUI-PT, STP dan Konsorsium.</li> <li>2. Merevitalisasi peran LPPM di perguruan tinggi sebagai simpul utama dalam proses intermediasi hasil riset ke industri dan masyarakat.</li> <li>3. Mengembangkan dan memperkuat peran <i>Centres of Excellence</i> atau PUI-PT dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan inovasi teknologi berbasis pengembangan produk dan saintifik.</li> <li>4. Mendorong pengembangan pusat-pusat unggulan (<i>Centres of Excellence</i>) berbasis kewilayahan dan potensi daerah untuk menjawab kebutuhan pembangunan wilayah dan industri di daerah.</li> <li>5. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk pendataan dan pemetaan peralatan laboratorium di seluruh perguruan tinggi, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan secara bersama oleh para peneliti.</li> </ol>
11.	Menguatnya rekognisi perguruan tinggi di tingkat global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yang diukur melalui peningkatan peringkat pada <i>THE Impact Rankings SDGs</i>.</li> </ol>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan jumlah perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan global bereputasi seperti <i>QS World Rankings</i> dan <i>THE Impact Rankings</i>.</li> <li>3. Memperkuat kemitraan strategis internasional dalam pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya LPTK, untuk memperluas akses terhadap <i>global best practices</i> dalam bidang pengajaran, penelitian, serta tata kelola institusional.</li> <li>4. Memberikan dukungan fasilitasi bantuan penguatan tata kelola perguruan tinggi penerima mahasiswa asing.</li> <li>5. Mengembangkan skema beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing di perguruan tinggi.</li> </ol>
12.	Meningkatkan peran lembaga yang melakukan diseminasi sains dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem repositori sains dan teknologi berbasis data terbuka.</li> <li>2. Membangun sistem aplikasi akses terpadu jurnal.</li> <li>3. Memberikan dukungan fasilitasi dan pembinaan lembaga dan jurnal ilmiah di perguruan tinggi.</li> <li>4. Memberikan dukungan fasilitasi dan penguatan perguruan tinggi dalam edukasi sains dan teknologi.</li> <li>5. Mengakselerasi promosi produk sains dan teknologi kepada masyarakat.</li> <li>6. Meningkatkan jumlah hasil sains dan teknologi di perguruan tinggi yang didiseminasikan dan dimanfaatkan.</li> <li>7. Memberikan dukungan fasilitasi dalam pemanfaatan sains dan teknologi untuk memperkuat daya saing masyarakat, dunia usaha, dan industri.</li> </ol>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
13.	Meningkatkan Peran Lembaga di Perguruan Tinggi dalam Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya peran <i>Science Techno Park</i> (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi.</li> <li>2. Meningkatnya peran lembaga yang melakukan diseminasi sains dan teknologi.</li> </ol>
14.	Meningkatkan Kualitas Keluaran Riset yang Berdampak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah kemitraan dalam riset dan pengembangan antara perguruan tinggi dan lembaga lainnya.</li> <li>2. Mengembangkan kerja sama riset internasional yang setara dan memberikan manfaat bersama bagi Indonesia dan mitra internasional melalui mekanisme pendanaan bersama (<i>co-funding</i>) berbasis kolaborasi antarpemerintah (<i>government to government</i>) untuk mendukung pencapaian dan keberlanjutan riset berdampak.</li> <li>3. Mendorong produktivitas riset yang relevan dengan sektor strategis pembangunan nasional maupun isu strategis global (ketahanan, pangan, energi, perubahan iklim, kesehatan, digitalisasi, dll.).</li> <li>4. Menerapkan inovasi metode sosialisasi kepada masyarakat di lapangan untuk meminimalisasi resistensi masyarakat terhadap penelitian di lapangan.</li> <li>5. Mendorong harmonisasi kebijakan dan pengembangan platform kolaborasi data yang terintegrasi.</li> <li>6. Membangun komunikasi dan pemahaman bersama antara industri dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kepercayaan industri terhadap hasil riset perguruan tinggi.</li> </ol>
15.	Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Sains, dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan ekosistem data pendidikan tinggi yang terintegrasi dan <i>data-driven</i> antara PTN, PTS,</li> </ol>

No.	Arah Kebijakan	Strategi
	Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	<p>dan Kemdiktisaintek untuk mendukung perumusan kebijakan yang akurat, efisien, dan terukur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Percepatan digitalisasi layanan internal melalui pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen yang terpadu.</li> <li>3. Implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi internal.</li> <li>4. Mendorong transformasi digital pemerintah di lingkungan Kemdiktisaintek sebagai bagian dari agenda nasional pemerintah digital (<i>digital government</i>).</li> <li>5. Membangun layanan pendidikan tinggi dan riset yang <i>user-centric</i> dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman layanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dengan tetap menjamin perlindungan data pribadi dan keamanan layanan digital secara menyeluruh.</li> <li>6. Melakukan pemantauan realisasi anggaran secara berkala dan pelaporan sistematis.</li> <li>7. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk penguatan kepatuhan (<i>compliance</i>) dan budaya integritas.</li> </ol>

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Poltekba 2025 - 2029

Arah kebijakan dan strategi Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi institusi, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran strategis yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan. Penyusunan sasaran dan strategi ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan pendidikan tinggi

vokasi, serta dinamika kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDI).

Arah kebijakan dan strategi ini dirancang untuk memastikan keterpaduan antara pengembangan pendidikan, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas lulusan, penguatan sumber daya manusia, peningkatan luaran riset yang berdampak, serta penguatan tata kelola institusi yang akuntabel dan berintegritas.

Selanjutnya, sasaran strategis dan strategi yang ditetapkan menjadi landasan dalam penyusunan program kerja dan indikator kinerja, guna menjamin tercapainya kinerja institusi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

**Sasaran 1:** Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

**Strategi** dalam Pencapaian Sasaran:

**1. Peningkatan Persentase Lulusan Tepat Waktu**

- a. Penataan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) yang dapat diselesaikan dalam masa studi normatif,
- b. Implementasi *early warning system* untuk memantau progres akademik mahasiswa,
- c. Optimalisasi peran dosen wali dalam perencanaan dan monitoring studi,
- d. Pengendalian proses tugas akhir melalui timeline yang terstruktur dan evaluasi berkala.

**2. Peningkatan Rerata IPK dan Penurunan Waktu Tunggu Lulusan**

- a. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui *student-centered learning* (case method dan *project-based learning*),
- b. Penyediaan program remedial, tutorial, dan pengayaan akademik,
- c. Penguatan kompetensi soft skills dan kesiapan kerja mahasiswa,
- d. Pengembangan layanan career center dan pelatihan kesiapan kerja.

**3. Peningkatan Persentase Lulusan Bekerja/Melanjutkan Studi/Berwirausaha**

- a. Penguatan kemitraan dengan industri untuk *campus hiring* dan penempatan kerja,

- b. Integrasi program magang sebagai jalur rekrutmen lulusan,
  - c. Pengembangan inkubasi bisnis dan kewirausahaan mahasiswa,
  - d. Pelaksanaan *tracer study* dan pemanfaatan data untuk peningkatan serapan lulusan.
- 4. Peningkatan Persentase Mahasiswa Berkegiatan di Luar Program Studi**
- a. Mewajibkan atau mengintegrasikan kegiatan di luar prodi (magang, pertukaran, riset, proyek independen) dalam kurikulum,
  - b. Memperluas kerja sama dengan mitra nasional dan internasional untuk program mobilitas mahasiswa,
  - c. Penyediaan dukungan pendanaan dan rekognisi SKS untuk kegiatan luar prodi,
  - d. Monitoring dan evaluasi program kegiatan mahasiswa secara berkala.
- 5. Peningkatan Persentase Prestasi Mahasiswa (Akademik/Non Akademik)**
- a. Pembinaan intensif mahasiswa melalui program *coaching* dan mentoring,
  - b. Penyediaan dana kompetisi dan fasilitasi keikutsertaan lomba,
  - c. Pembentukan unit pembinaan prestasi mahasiswa di tingkat institusi/prodi,
  - d. Pemberian insentif dan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi.

**Sasaran 2:** Peningkatan SDM dan Kualitas Luaran Riset yang Berdampak

**Strategi** dalam Pencapaian Sasaran:

- 1. Peningkatan Keterlibatan Dosen dalam Tridharma di Perguruan Tinggi Lain**
- a. Menetapkan program *visiting lecturer*, *adjunct professor*, dan kolaborasi lintas Perguruan Tinggi,
  - b. Memberikan dukungan administratif dan insentif bagi dosen yang berkegiatan di Perguruan Tinggi lain,
  - c. Memfasilitasi jejaring nasional dan internasional berbasis bidang keahlian.
- 2. Peningkatan Rekognisi Internasional dan Dampak Karya Dosen**
- a. Mendorong publikasi dan partisipasi aktif dalam forum ilmiah internasional,

- b. Memfasilitasi penerapan hasil riset di masyarakat, industri, dan pemerintah,
  - c. Memberikan insentif berbasis kinerja untuk capaian rekognisi internasional.
- 3. Penguatan Hilirisasi dan Luaran Kerja Sama**
- a. Mengembangkan unit hilirisasi dan inovasi,
  - b. Mendorong riset kolaboratif dengan industri yang menghasilkan produk siap pakai,
  - c. Menetapkan target luaran kerja sama berbasis output (produk, teknologi, layanan).
- 4. Peningkatan Publikasi Internasional Bereputasi (Scopus/WoS)**
- a. Program pendampingan penulisan artikel ilmiah dan klinik publikasi,
  - b. Insentif publikasi pada jurnal bereputasi internasional,
  - c. Kolaborasi penulisan dengan mitra luar negeri (*co-author international*).
- 5. Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen (S3)**
- a. Penyediaan beasiswa dan kelas Kerjasama pada studi lanjut S3 (dalam dan luar negeri),
  - b. Pengaturan beban kerja dosen untuk mendukung studi lanjut,
  - c. Monitoring progres studi dosen secara berkala.
- 6. Percepatan Kenaikan Jabatan Akademik (Lektor Kepala & Guru Besar)**
- a. Pendampingan penyusunan portofolio dan angka kredit,
  - b. Pelayanan informasi jabatan akademik dan publikasi ilmiah,
  - c. Penetapan target kenaikan jabatan akademik per tahun.
- 7. Integrasi Pembelajaran Berbasis Riset (*Case Method & Team-Based Project*)**
- a. Mewajibkan implementasi metode pembelajaran berbasis kasus dan proyek pada mata kuliah,
  - b. Pelatihan dosen dalam *student-centered learning* berbasis riset,
  - c. Integrasi hasil penelitian ke dalam materi pembelajaran.
- 8. Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)**
- a. Pengembangan riset terapan berbasis kebutuhan masyarakat/industri,

- b. Pendanaan khusus untuk pengembangan TTG hingga tingkat implementasi,
  - c. Diseminasi dan adopsi teknologi oleh pengguna.
- 9. Peningkatan Kekayaan Intelektual (Paten Sederhana & Buku ISBN)**
- a. Fasilitasi pendaftaran HKI dan paten sederhana,
  - b. Insentif penulisan buku ajar dan referensi ber-ISBN,
  - c. Pendampingan penyusunan dokumen paten dan publikasi buku.
- 10. Peningkatan Pendanaan Eksternal (Luar Negeri)**
- a. Pembentukan tim penyusun proposal hibah internasional,
  - b. Pelatihan penulisan proposal riset internasional,
  - c. Penguatan jejaring dengan lembaga dari universitas luar negeri.
- 11. Peningkatan Jumlah Publikasi Internasional Bereputasi**
- a. Target minimal publikasi per dosen per tahun,
  - b. Skema kolaborasi penelitian lintas negara,
  - c. Monitoring kinerja publikasi berbasis database terintegrasi.
- 12. Peningkatan Kolaborasi Penelitian Internasional**
- a. Pengembangan *joint research* dan *joint publication* dengan mitra luar negeri,
  - b. Program mobilitas dosen (*short course, sabbatical, visiting research*),
  - c. Pemanfaatan kerja sama internasional untuk riset bersama.

**Sasaran 3:** Peningkatan Peran Lembaga di Perguruan Tinggi dalam Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi

**Strategi** dalam Pencapaian Sasaran:

- 1. Peningkatan Capaian Kontribusi terhadap SDGs**
- a. Menetapkan *roadmap* pengabdian dan penelitian berbasis SDGs yang terintegrasi dalam Renstra dan Rencana Induk Penelitian/PkM,
  - b. Mengalokasikan pendanaan internal khusus untuk program berbasis SDGs prioritas,
  - c. Mengembangkan program *flagship* (unggulan) institusi pada bidang air, sanitasi, dan perubahan iklim,
  - d. Melakukan pelaporan dan pengukuran kontribusi SDGs berbasis output dan *outcome*.

- 2. Peningkatan Keterlibatan Dosen dalam Penyusunan Kebijakan**
  - a. Membentuk *policy research group* pada tiap Jurusan,
  - b. Menjalinkan kerja sama formal dengan pemerintah daerah/instansi untuk penyusunan kajian kebijakan,
  - c. Memberikan penghargaan bagi dosen yang terlibat dalam penyusunan regulasi/kebijakan,
  - d. Mendorong publikasi *policy brief* berbasis hasil penelitian.
  
- 3. Peningkatan Kerja Sama Internasional**
  - a. Menetapkan target minimal kerja sama internasional per jurusan per tahun,
  - b. Mengembangkan program *joint research*, *joint publication*, dan *staff exchange*,
  - c. Mengoptimalkan unit kerja sama internasional untuk penjangkauan mitra strategis,
  - d. Mengarahkan kerja sama pada bidang keahlian unggulan prodi.
  
- 4. Peningkatan Kerja Sama Nasional**
  - a. Memperluas kemitraan dengan industri, BUMN, pemerintah, dan lembaga riset nasional,
  - b. Mengembangkan kerja sama berbasis implementasi (magang, riset terapan, hilirisasi),
  - c. Mewajibkan setiap program studi memiliki mitra aktif sesuai bidang keahlian.
  
- 5. Peningkatan Jumlah Program Studi Terakreditasi Unggul**
  - a. Melaksanakan pendampingan intensif akreditasi berbasis data dan luaran,
  - b. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat prodi,
  - c. Penyediaan dukungan sumber daya (SDM, sarpras, dokumen) untuk percepatan akreditasi unggul.
  
- 6. Penambahan Program Studi Baru**
  - a. Melakukan studi kelayakan berbasis kebutuhan industri dan tren teknologi,
  - b. Mengembangkan prodi baru berbasis keunggulan institusi dan potensi daerah,
  - c. Menyusun kurikulum prodi baru berbasis OBE dan kebutuhan DUDI.

- 7. Peningkatan Laboratorium/Workshop Bersertifikasi Internasional**
  - a. Melakukan pemetaan dan standardisasi laboratorium sesuai standar internasional,
  - b. Mengalokasikan anggaran untuk modernisasi peralatan dan fasilitas,
  - c. Menyiapkan SDM laboran yang tersertifikasi.
  
- 8. Penguatan Hilirisasi dan Layanan Iptek**
  - a. Membentuk unit khusus hilirisasi dan inovasi (inkubator bisnis/teknologi),
  - b. Mendorong kerja sama riset yang menghasilkan produk siap pakai,
  - c. Menyediakan layanan konsultasi dan teknologi tepat guna bagi masyarakat/industri,
  - d. Mengukur dampak pemanfaatan Iptek terhadap Masyarakat.
  
- 9. Penguatan Tata Kelola dan Monitoring Kinerja**
  - a. Mengembangkan dashboard kinerja indikator berbasis digital,
  - b. Monitoring capaian indikator secara berkala (triwulan/tahunan),
  - c. Evaluasi berbasis data untuk perbaikan strategi berkelanjutan.

**Sasaran 4:** Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi

**Strategi** dalam Pencapaian Sasaran:

- 1. Optimalisasi Kinerja Keuangan dan Aset (Persentase Pendapatan terhadap Total Aset)**
  - a. Mengembangkan unit usaha dan layanan pendidikan berbayar berbasis kompetensi unggulan,
  - b. Meningkatkan pemanfaatan aset kampus secara produktif (sewa, kerja sama, layanan lab),
  - c. Diversifikasi sumber pendapatan (kerja sama industri, pelatihan, sertifikasi),
  - d. Penguatan manajemen aset berbasis digital dan valuasi berkala.
  
- 2. Peningkatan Alokasi Dana untuk Pengembangan SDM Dosen**
  - a. Menetapkan kebijakan minimal alokasi dana masyarakat untuk *upskilling* dan *upgrading* dosen,
  - b. Prioritas pembiayaan untuk studi lanjut, sertifikasi, dan pelatihan pada industri,
  - c. Monitoring efektivitas penggunaan anggaran terhadap peningkatan kompetensi dosen.

- 3. Peningkatan Alokasi Dana untuk Modernisasi Laboratorium**
  - a. Menetapkan porsi anggaran khusus untuk *updating* peralatan laboratorium sesuai standar industri,
  - b. Sinkronisasi pengadaan sarana dengan kebutuhan kurikulum dan riset terapan,
  - c. Mendorong *co-funding* dengan industri untuk pengembangan fasilitas laboratorium.
  
- 4. Implementasi Zona Integritas (WBK/WBBM)**
  - a. Pembangunan budaya integritas melalui penerapan Zona Integritas di seluruh unit kerja,
  - b. Penguatan sistem pengendalian internal dan transparansi layanan,
  - c. Digitalisasi layanan untuk meminimalisasi praktik korupsi,
  - d. Monitoring dan evaluasi capaian WBK/WBBM secara berkala.
  
- 5. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan**
  - a. Penerapan sistem akuntansi berbasis standar digital secara konsisten,
  - b. Penguatan kapasitas SDM keuangan melalui pelatihan dan sertifikasi,
  - c. Audit internal berkala,
  - d. Tindak lanjut hasil audit secara sistematis dan tepat waktu.
  
- 6. Peningkatan Predikat SAKIP Perguruan Tinggi**
  - a. Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja berbasis *outcome*,
  - b. Penguatan cascading kinerja dari institusi hingga unit kerja,
  - c. Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur,
  - d. Peningkatan kualitas pelaporan LAKIP secara berkala.
  
- 7. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik**
  - a. Penyusunan dan penegakan regulasi integritas akademik (plagiarisme, kecurangan akademik),
  - b. Implementasi sistem deteksi plagiarisme,
  - c. Pembentukan unit etik dan disiplin akademik,
  - d. Sosialisasi budaya akademik berintegritas kepada sivitas akademika.

- 8. Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Narkoba, dan Anti Korupsi**
  - a. Peningkatan satgas pencegahan dan penanganan kekerasan serta penyalahgunaan narkoba,
  - b. Edukasi berkelanjutan tentang anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi,
  - c. Penyediaan layanan pelaporan dan pendampingan korban,
  - d. Kerja sama dengan instansi terkait.
  
- 9. Penguatan Perencanaan Kesejahteraan Dosen**
  - a. Penyusunan dokumen perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen,
  - b. Pengembangan skema insentif berbasis kinerja Tridharma,
  - c. Penyediaan dukungan fasilitas kesejahteraan (kesehatan, pengembangan karier),
  - d. Evaluasi berkala terhadap tingkat kesejahteraan dosen.
  
- 10. Peningkatan Kinerja Anggaran (Nilai Kinerja RKA-K/L)**
  - a. Perencanaan anggaran berbasis kinerja dan prioritas strategis,
  - b. Penguatan kapasitas perencanaan dan pengelolaan anggaran di unit kerja,
  - c. Monitoring realisasi anggaran secara berkala,
  - d. Evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
  
- 11. Pengembangan Sarana dan Prasarana (Penambahan Gedung/Bangunan)**
  - a. Penyusunan masterplan pengembangan kampus berbasis kebutuhan jangka Panjang,
  - b. Prioritas pembangunan gedung pendukung pembelajaran, riset, dan layanan mahasiswa,
  - c. Penguatan skema pendanaan pembangunan (APBN, kerja sama, KPBU),
  - d. Pengawasan pelaksanaan pembangunan berbasis mutu dan waktu.

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi merupakan perencanaan dan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Politeknik Negeri Balikpapan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur seluruh unsur kelembagaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis institusi.

Kerangka regulasi Politeknik Negeri Balikpapan pada Renstra 2025–2029 disusun berdasarkan arah pengembangan institusi yang diturunkan dari rencana sasaran, indikator, dan program Renstra 2025–2029, yang meliputi Sasaran 1: Talenta, Sasaran 2: Inovasi, Sasaran 3: Kontribusi/Dedikasi pada Masyarakat, dan Sasaran 4: Tata Kelola Berintegritas. Berdasarkan sasaran tersebut, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan mutu dan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, peningkatan kualitas SDM dan luaran riset yang berdampak, penguatan kontribusi institusi kepada masyarakat dan mitra, serta penguatan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel dan berintegritas. Tabel 3.2 memperlihatkan rencana kebutuhan regulasi sesuai fokus dan arah kebijakan Politeknik Negeri Balikpapan tahun 2025–2029.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Kebutuhan Regulasi

Fokus	Arah Kebijakan	Kebutuhan Regulasi Internal
Penguatan Talenta dan Relevansi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan persentase lulusan D3 dan Sarjana Terapan yang lulus tepat waktu.</li> <li>• Peningkatan mutu lulusan melalui penguatan IPK, penurunan masa tunggu lulusan, dan peningkatan lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi.</li> <li>• Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di luar program studi, seperti magang, riset, pertukaran pelajar, dan program berdampak.</li> <li>• Peningkatan prestasi mahasiswa di tingkat provinsi, nasional, dan internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan kurikulum berbasis <i>Outcome Based Education</i> (OBE) dan link and match dengan DUDIKA.</li> <li>• Pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi/magang/pertukaran pelajar/riset mahasiswa.</li> <li>• Pedoman tracer study, pusat karier, dan layanan alumni.</li> <li>• Pedoman pembinaan prestasi dan organisasi kemahasiswaan.</li> <li>• Kebijakan sertifikasi kompetensi mahasiswa dan penguatan <i>soft skills</i> lulusan.</li> </ul>
Penguatan Inovasi Pendidikan, SDM, dan Riset Terapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-orientasi kurikulum dan re-organisasi sistem pengelolaan pendidikan.</li> <li>• Peningkatan dosen berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, industri, atau lembaga mitra.</li> <li>• Peningkatan rekognisi dosen, hilirisasi hasil kerja sama, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• Panduan pengembangan dan evaluasi kurikulum OBE.</li> <li>• Panduan implementasi pembelajaran inovatif : <i>case</i></li> </ul>

Fokus	Arah Kebijakan	Kebutuhan Regulasi Internal
	<p>publikasi bereputasi internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualifikasi akademik dosen, jabatan fungsional, serta kompetensi pedagogik dan teknopedagogik.</li> <li>• Peningkatan penerapan case method dan project-based learning.</li> <li>• Penguatan luaran inovasi berupa teknologi tepat guna, paten sederhana, buku ber-ISBN, dan penelitian/pengabdian yang didukung pendanaan eksternal.</li> <li>• Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana akademik, laboratorium, dan workshop.</li> </ul>	<p><i>method, project - based learning, blended / hybrid learning, LMS, dan pemanfaatan AI dalam pembelajaran.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan rekrutmen, penugasan, dan pengembangan dosen praktisi serta dosen berkegiatan di industri.</li> <li>• Kebijakan penelitian terapan, publikasi ilmiah, HKI, hilirisasi, dan komersialisasi inovasi.</li> <li>• Pedoman pengelolaan laboratorium / workshop dan pengembangan sarana-prasarana pembelajaran.</li> <li>• Kebijakan peningkatan kualifikasi akademik, jabatan fungsional, dan sertifikasi dosen/tenaga kependidikan.</li> </ul>
<p>Penguatan Kontribusi kepada Masyarakat, Kemitraan, dan Reputasi Kelembagaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kontribusi institusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya pendidikan berkualitas, pengentasan kemiskinan, kemitraan, dan isu strategis lainnya sesuai keunggulan institusi.</li> <li>• Peningkatan keterlibatan dosen dalam penyusunan kebijakan nasional, daerah, dan industri.</li> <li>• Peningkatan kerja sama nasional dan internasional sesuai bidang keahlian jurusan.</li> <li>• Pengembangan program studi unggul dan program studi baru sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan dunia kerja.</li> <li>• Peningkatan jumlah laboratorium/workshop tersertifikasi internasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan kemitraan strategis, MoU, MoA, dan implementasi kerja sama dengan pemerintah, industri, asosiasi profesi, dan mitra internasional.</li> <li>• Pedoman pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan, teknologi tepat guna, kewirausahaan, dan SDGs.</li> <li>• Kebijakan pelibatan dosen/ahli dalam penyusunan rekomendasi kebijakan publik dan kebijakan industri.</li> <li>• Pedoman pembukaan, evaluasi, dan pengembangan program studi baru.</li> <li>• Kebijakan pengelolaan laboratorium/workshop menuju sertifikasi nasional/internasional.</li> <li>• Kebijakan penguatan pusat inovasi, pusat unggulan, dan jejaring kolaborasi kelembagaan.</li> </ul>

Fokus	Arah Kebijakan	Kebutuhan Regulasi Internal
Penguatan Tata Kelola Berintegritas dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pendapatan non-akademik dan optimalisasi sumber pendanaan institusi.</li> <li>• Penguatan alokasi pendapatan untuk <i>upskilling</i> dan <i>upgrading</i> dosen serta pembaruan laboratorium.</li> <li>• Penguatan Zona Integritas, akuntabilitas keuangan, dan pencapaian predikat SAKIP.</li> <li>• Pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik, anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi.</li> <li>• Penyediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen.</li> <li>• Peningkatan nilai kinerja anggaran dan pengembangan gedung/bangunan penunjang institusi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pengelolaan pendapatan non - UKT, optimalisasi aset, dan diversifikasi sumber pendanaan.</li> <li>• Kebijakan alokasi dana untuk pengembangan SDM dan modernisasi laboratorium.</li> <li>• Kebijakan manajemen risiko, pengendalian internal, dan penguatan SAKIP.</li> <li>• Kebijakan Zona Integritas dan reformasi birokrasi.</li> <li>• Kode etik akademik dan pedoman pencegahan serta penanganan pelanggaran integritas akademik.</li> <li>• Kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus serta kebijakan anti narkoba dan anti korupsi.</li> <li>• Kebijakan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>• Masterplan pengembangan sarana dan prasarana kampus.</li> </ul>

Kebutuhan regulasi Politeknik Negeri Balikpapan secara lebih rinci dapat dijabarkan dalam matriks kerangka regulasi yang memuat arah kerangka regulasi, urgensi pembentukan regulasi berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, unit penanggung jawab, unit atau pihak terkait, serta target penyelesaian regulasi.

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Politeknik Negeri Balikpapan merupakan dasar utama dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Poltekba 2025-2029. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi Politeknik Negeri Balikpapan telah diatur dan terstruktur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan yang juga diturunkan dalam Keputusan Direktur No.0232/PL32/OT/2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi Politeknik Negeri Balikpapan 2025, serta Statuta sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Statuta Politeknik Negeri Balikpapan. Semua organ baik pengelola maupun pengawasan melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing dalam rangka penyelenggaraan akademik maupun non akademik dan bertanggung jawab kepada Direktur selaku pimpinan organisasi. Sesuai dengan Peraturan pemerintah RI. Nomor 4/2014 tentang penyelenggaraan pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi tanggal 30 Januari 2014 pada pasal 1 ayat 10 bahwa Politeknik adalah Perguruan Tinggi (PT) yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu dan/atau teknologi. Poltekba merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

#### **1. Struktur Organisasi**

Politeknik Negeri Balikpapan mempunyai Susunan Organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan dan Keputusan Direktur No.0232/PL32/OT/2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi Politeknik Negeri Balikpapan 2025.



Dalam menjalankan fungsi, Direktur mempunyai tugas & wewenang:

- 1) Menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan OTK Politeknik Negeri Balikpapan.
- 2) Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun.
- 3) Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun.
- 4) Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) Poltekba.
- 5) Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Poltekba.
- 6) Mengangkat/memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Memberikan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik.
- 8) Memberikan sanksi kepada dosen & tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan.
- 10) Menerima, membina, mengembangkan, memberhentikan mahasiswa.
- 11) Mengelola anggaran Poltekba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian.
- 13) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri.
- 14) Mengusulkan pengangkatan/pengukuhan profesor kepada Menteri.
- 15) Membina dan mengembangkan hubungan Poltekba dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat dan
- 16) Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma.

## **B. Wakil Direktur**

Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, terdiri atas:

- 1) Wakil Direktur Bidang Akademik  
Mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum  
Mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, sistem Informasi, dan umum.
- 3) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.  
Mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

### **C. Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin**

Unsur organisasi di bawah pemimpin terdiri atas unsur:

- 1) Pelaksana Akademik

Unsur pelaksana akademik dilaksanakan oleh:

#### **Jurusan**

Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi. Jurusan terdiri atas:

- Jurusan Teknik Mesin
- Jurusan Teknik Sipil
- Jurusan Rekayasa Elektro
- Jurusan Pariwisata
- Jurusan Bisnis

Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus dan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur. Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan. Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur melalui hasil pemilihan di Majelis Jurusan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua jurusan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Memimpin, mengorganisasi dan menyusun rencana program kerja dan anggaran serta memantau/mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan, pengajaran & penelitian dilingkup bidang tertentu.
- Menganalisis kebutuhan sumber daya dan pengembangannya.

- Memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan di jurusan.
- Memonitor kegiatan Program Studi.
- Mengevaluasi kinerja Dosen dan kegiatan proses belajar mengajar dan membuat laporan diakhir semester.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Menyusun program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu bidang ilmu.
- Menentukan pola pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di program studi/jurusan di Politeknik negeri Balikpapan.
- Menyusun pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- Melakukan seleksi pengadaan tenaga pendidik yang akan ditempatkan di program studi di bawahnya.
- Menyetujui dan melakukan otorisasi kurikulum yang akan digunakan dan alokasi beban kerja.
- pusat yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## 2) Pelaksana Administrasi

Unsur pelaksana administrasi dilaksanakan oleh bagian yang terdiri atas :

### a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan alumni, dan kerja sama. dalam melaksanakan tugas Bagian akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Pelaksanaan registrasi Mahasiswa dan statistik akademik
- Pengelolaan data dan sarana akademik
- Pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa
- Pengelolaan data kemahasiswaan dan alumni
- Fasilitas kegiatan kemahasiswaan dan alumni
- Pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas :

1. Subbagian Akademik

Mempunyai tugas melakukan layanan administrasi dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi mahasiswa, dan statistik akademik serta pengelolaan data dan sarana akademik.

2. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

b. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum.

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran
- Pelaksanaan urusan keuangan
- Pelaksanaan urusan hukum
- Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan
- Pelaksanaan urusan kepegawaian
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan
- Pelaksanaan urusan kearsipan
- Pelaksanaan urusan keprotokolan
- Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan
- Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat
- Pengelolaan data dan pemberian layanan Informasi
- Pengelolaan Barang Milik Negara

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum terdiri atas:

1. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, dokumentasi, keprotokolan, layanan pimpinan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana Poltekba.

2. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

c. Penjaminan Mutu

Unsur penjaminan mutu dilaksanakan oleh pusat yang melaksanakan fungsi penjaminan mutu. Pusat merupakan unsur pelaksana akademik dan pusat merupakan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pusat terdiri atas :

1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran;
- Pelaksanaan penelitian Ilmiah murni dan terapan;
- Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat;
- Koordinasi Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- Pelaksanaan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Pelaksanaan urusan administrasi.

2. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (P2MPP)

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugas Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi;

- Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi; serta peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- Pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama di bidang penjaminan mutu; pendidikan mutu dan pengembangan pembelajaran;
- Pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan tinggi dan pengembangan pembelajaran;
- Pelaksanaan urusan administrasi.

### 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unit penunjang akademik di bidang teknologi Informasi dan komunikasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi Informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem Informasi dan jaringan. Unit penunjang akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencanam program, dan anggaran;
- Pengembangan dan pengelolaan teknologi Informasi dan komunikasi;
- Pemberian layanan di bidang teknologi Informasi dan komunikasi;
- Pengembangan dan pengelolaan sistem Informasi;
- Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan;
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha.

### 4. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan

Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan merupakan unit penunjang akademik di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa. Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi dunia usaha, dunia Industri, dan dunia kerja;

- Peningkatan kemampuan mahasiswa di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa;
- Fasilitasi dan kerja sama pengembangan karier dan kewirausahaan Mahasiswa;
- Pemberian layanan Informasi pengembangan karier dan kewirausahaan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha.

#### 5. Perawatan dan Perbaikan

Unit Penunjang Akademik Perawatan dan Perbaikan merupakan unit penunjang akademik di bidang perawatan dan perbaikan sarana penunjang akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan sarana penunjang akademik, dalam melaksanakan tugas Unit Penunjang Akademik Perawatan dan Perbaikan menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pemeliharaan sarana penunjang akademik;
- Pemberian layanan perbaikan dan perawatan sarana penunjang akademik;
- Pendataan sarana penunjang akademik;
- Pelaksanaan urusan tata usaha.

#### 6. Layanan Uji Kompetensi

Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi merupakan unit penunjang akademik di bidang layanan uji kompetensi yang mempunyai tugas melaksanakan layanan uji kompetensi. Dalam melaksanakan tugas, unit penunjang akademik layanan uji kompetensi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Penyusunan bahan usul pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi tertentu;
- Fasilitasi layanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia uji kompetensi profesi;
- Pemberian layanan uji kompetensi;
- Pelaksanaan urusan tata usaha.

#### **D. Satuan Pengawas Internal**

Dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Perguruan Tinggi perlu mendapat pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien, dan efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama direktur. Dalam melaksanakan tugas SPI Poltekba menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Menyusun program pengawasan;
2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program;
3. Melakukan pengawasan kepegawaian, keuangan, dan barang milik Negara;
4. Melakukan pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
5. Melakukan pendampingan & revidi laporan keuangan;
6. Memberi saran dan rekomendasi;
7. Menyusun laporan hasil pengawasan ke Direktur, dan;
8. Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan.
9. Keanggotaan SP berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 orang sesuai kebutuhan dan beban kerja terdiri atas:
  - Ketua merangkap anggota
  - Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota. Anggota SP Poltekba diangkat diberhentikan oleh Direktur yang memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengawasan, pengelolaan anggaran, pengelolaan asset, pengelolaan kepegawaian, atau organisasi dengan masa jabatan keanggotaan SP adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

#### **E. Dewan Penyantun**

Merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta Poltekba. Dewan Penyantun merupakan organ Poltekba yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan non-akademik.

Dewan Penyantun mempunyai tugas & kewenangan:

1. Pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
2. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Poltekba;
3. Penggalangan dana untuk membantu pembangunan Poltekba.

## 2. Pengelolaan SDM

Perencanaan pengelolaan SDM dilakukan dengan baik karena termasuk perencanaan strategis dan merupakan unsur yang menentukan dalam pengembangan Poltekba kedepannya. Penetapan standar SDM baik standar wajib dan standar turunan meliputi mutu SDM berupa profil dosen, kinerja penelitian dan PkM serta kecukupan tenaga kependidikan.

Rencana dan Program Sumber Daya Manusia (SDM) mengacu kepada Renstra Kemendikbudristek, Poltekba salah satu Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) untuk itu pengembangan SDM yang ada agar menciptakan tatakelola yang baik dan fleksibel sehingga mampu membuat keputusan tanpa dibebani oleh masalah birokrasi dan aturan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Target Program Peningkatan Kualitas SDM POLTEKBA

Sasaran Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas, dan kuantitas Tenaga Pendidik (Dosen) Poltekba	1. Jumlah Dosen mengikuti beasiswa S2 & S3 dalam negeri
	2. Jumlah Dosen mengikuti beasiswa S2 & S3 luar negeri
	3. Jumlah Dosen bersertifikasi
	4. Persentase Dosen menguasai bahasa asing
	5. Jumlah Dosen ditingkatkan kompetensinya
	6. Penambahan Dosen PNS
	7. Penambahan Jumlah Dosen non PNS sesuai ketentuan
Meningkatnya kualitas, dan kuantitas tenaga kependidikan	1. Jumlah Tenaga Kependidikan mengikuti beasiswa S1 dan S2 dalam negeri
	2. Jumlah Tenaga Kependidikan mengikuti beasiswa S2 luar negeri
	3. Jumlah Tenaga Kependidikan ditingkatkan kompetensinya
	4. Penambahan Tenaga Kependidikan dari PNS
	5. Penambahan Tenaga kependidikan non PNS.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran Poltekba maka Poltekba menetapkan target kinerja yang akan menjadi tolok ukur dan mencerminkan keberhasilan dari satu atau beberapa program yaitu yang tergambar pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja

Sasaran Program	Target Kinerja
TALENTA	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi <b>[IKU 1.1]</b>
	IPK dan Masa Tunggu Lulusan
	Persentase Lulusan yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan <b>[IKU 1.2]</b>
	Persentase Mahasiswa S.Tr dan D3 berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi <b>[IKU 1.3]</b>
INOVASI	Persentase Dosen Perguruan Tinggi yang mendapatkan Rekognisi Internasional atau Hasil Penelitiannya diterapkan oleh masyarakat <b>[IKU 2.1]</b>
	Persentase Luaran Hasil Kerjasama dan Hilirisasi antara PT dan industri/lembaga <b>[IKU 2.2]</b>
	Publikasi bereputasi internasional (Scopus/Wos) <b>[IKU 2.3]</b>
	Peningkatan Kualifikasi dosen
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.
	Jumlah Teknologi Terapan yang dihasilkan Program Studi
	Luaran Lainnya yang dihasilkan Program Studi
	Persentase Penelitian Berkolaborasi Internasional
KONTRIBUSI/DEDIKASI PADA MASYARAKAT	Persentase dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs Lain Sesuai Keunggulan <b>[IKU 3.1]</b>
	Persentase Sumber daya manusia (SDM) Pendidikan Tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri) <b>[IKU 3.2]</b>
	Kemitraan Jurusan
	Pegembangan Program Studi

Sasaran Program	Target Kinerja
TATA KELOLA BERINTEGRITAS	Pendapatan/Penghasilan dari Bidang Non-Akademik (selain UKT/Uang Kuliah) <b>[IKU 4.1]</b>
	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani <b>[IKU 4.2]</b>
	Hasil Audit atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi <b>[IKU 4.3a]</b>
	Predikat SAKIP Perguruan Tinggi <b>[IKU 4.3b]</b>
	Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik <b>[IKU 4.3c]</b>
	Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Anti Narkoba , Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya (Narkoba); dan Anti Korupsi <b>[IKU 4.3d]</b>
	Ketersediaan Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen <b>[IKU 4.4]</b>
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L <b>[IKU 4.5]</b>
	Pengembangan Sarana dan Prasarana

## 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan diperlukan perencanaan pendanaan secara komprehensif. Kebutuhan pendanaan inimenjadi dasar pertimbangan untuk memastikan seluruh sasaran dapat tercapai secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan berdampak tinggi. Estimasi kebutuhan pendanaan mencakup belanja modal, biaya operasional, belanja barang/jasa dan pembiayaan lainnya. Pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersumber dari:

- 1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. APBN Rupiah Murni (RM) – Mengikat (Operasional/BOPTN)
  - b. APBN Rupiah Murni – Tidak Mengikat (SBSN/PHLN/KPBU/Kementerian lain)
- 2) Penerimaan PTN yang terdiri dari:
  - a. Penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
  - b. Penerimaan non UKT yang bersumber dari aset dan pelatihan, jasa kepakaran, pemanfaatan aset, komersialisasi hasil produk dan jasa lainnya.

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2025-2029 di seluruh Unit Kerja UNG, tertuang pada Tabel 4.2 sebagai berikut :



Tabel 4.2 Kebutuhan Alokasi Pendanaan Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Program Strategis	Alokasi Pendanaan (Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Talenta	PS 1 Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi	1,631,809,000	1,794,989,000	2,064,237,000	2,477,084,000	3,096,355,000
		PS 2 IPK dan Masa Tunggu Lulusan	1,223,856,000	1,346,241,000	1,548,177,000	1,857,812,000	2,322,265,000
		PS 3 Persentase Lulusan yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	2,447,713,000	2,692,484,000	3,096,356,000	3,715,627,000	4,644,533,000
		PS 4 Persentase Mahasiswa S.Tr dan D3 berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	2,855,665,000	3,141,231,000	3,612,415,000	4,334,898,000	5,418,622,000
<b>Jumlah</b>			<b>8,159,043,000</b>	<b>8,974,945,000</b>	<b>10,321,185,000</b>	<b>12,385,421,000</b>	<b>15,481,775,000</b>
No.	Sasaran Strategis	Program Strategis	Alokasi Pendanaan (Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Inovasi	PS 5 Persentase Dosen Perguruan Tinggi yang mendapatkan Rekognisi Internasional atau Hasil Penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	731,562,000	804,718,000	925,425,000	1,110,510,000	1,388,137,000
		PS 6 Persentase Luaran Hasil Kerjasama dan Hillirisasi antara PT dan industri/lembaga	1,280,234,000	1,408,257,000	1,619,495,000	1,943,394,000	2,429,242,000
		PS 7 Publikasi bereputasi internasional (Scopus/Wos)	2,148,964,000	2,363,860,000	2,718,439,000	3,262,126,000	4,077,657,000
		PS 8 Peningkatan Kualifikasi dosen	1,097,343,000	1,207,077,000	1,388,138,000	1,665,765,000	2,082,206,000
		PS 9 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	823,007,000	905,307,000	1,041,103,000	1,249,323,000	1,561,653,000
		PS 10 Jumlah Teknologi Terapan yang dihasilkan Program Studi	914,453,000	1,005,898,000	1,156,782,000	1,388,138,000	1,735,172,000
		PS 11 Luaran Lainnya yang dihasilkan Program Studi	960,175,000	1,056,192,000	1,214,620,000	1,457,544,000	1,821,930,000
		PS 12 Persentase Penelitian Berkolaborasi Internasional	1,188,789,000	1,307,667,000	1,503,817,000	1,804,580,000	2,255,725,000
<b>Jumlah</b>			<b>9,144,527,000</b>	<b>10,058,976,000</b>	<b>11,567,819,000</b>	<b>13,881,380,000</b>	<b>17,351,722,000</b>



No.	Sasaran Strategis	Program Strategis	Alokasi Pendanaan (Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Kontribusi/ Dedikasi Pada Masyarakat	PS 13 Persentase dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs Lain Sesuai Keunggulan	1,625,501,000	1,788,051,000	2,056,258,000	2,467,509,000	3,084,386,000
		PS 14 Persentase Sumber daya manusia (SDM) Pendidikan Tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	1,300,401,000	1,430,441,000	1,645,007,000	1,974,008,000	2,467,510,000
		PS 15 Kemitraan Jurusan	2,080,642,000	2,288,706,000	2,632,011,000	3,158,413,000	3,948,016,000
		PS 16 Pengembangan Program Studi	1,495,461,000	1,645,007,000	1,891,758,000	2,270,109,000	2,837,636,000
<b>Jumlah</b>			<b>6,502,005,000</b>	<b>7,152,205,000</b>	<b>8,225,034,000</b>	<b>9,870,039,000</b>	<b>12,337,548,000</b>

No.	Sasaran Strategis	Program Strategis	Alokasi Pendanaan (Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029
4	Tata Kelola Berintegritas	PS 17 Pendapatan/Penghasilan dari Bidang Non-Akademik (selain UKT/Uang Kuliah)	3,242,691,000	3,566,960,000	4,102,004,000	4,922,404,000	6,153,005,000
		PS 18 Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	1,962,138,000	2,158,351,000	2,482,103,000	2,978,523,000	3,723,153,000
		PS 19 Hasil Audit atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi	1,445,786,000	1,590,364,000	1,828,918,000	2,194,701,000	2,743,376,000
		PS 20 Predikat SAKIP Perguruan Tinggi	2,168,679,000	2,385,546,000	2,743,377,000	3,292,052,000	4,115,065,000
		PS 21 Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	1,197,937,000	1,317,730,000	1,515,389,000	1,818,466,000	2,273,082,000
		PS 22 Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Anti Narkoba, Psicotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya (Narkoba); dan Anti Korupsi	1,135,974,000	1,249,571,000	1,437,006,000	1,724,407,000	2,155,508,000
		PS 23 Ketersediaan Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen	1,817,559,000	1,999,314,000	2,299,211,000	2,759,053,000	3,448,816,000
		PS 24 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	1,858,867,000	2,044,753,000	2,351,465,000	2,821,758,000	3,527,197,000
		PS 25 Pengembangan Sarana dan Prasarana	5,824,452,000	6,406,897,000	7,367,931,000	8,841,517,000	11,051,896,000
<b>Jumlah</b>			<b>20,654,083,000</b>	<b>22,719,486,000</b>	<b>26,127,404,000</b>	<b>31,352,881,000</b>	<b>39,191,098,000</b>
<b>Jumlah</b>			<b>44,459,658,000</b>	<b>48,905,612,000</b>	<b>56,241,442,000</b>	<b>67,489,721,000</b>	<b>84,362,143,000</b>

## BAB V PENUTUP

Demikian pedoman ini dibuat pedoman ini bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan peta jalan menuju transformasi. Politeknik Negeri Balikpapan bertekad untuk memperkuat perannya sebagai pusat inovasi teknologi terapan yang mendukung *Smart City* IKN dan ketahanan industri nasional .

Melalui pedoman ini, kami mengajak seluruh sivitas akademika untuk bergerak sinergis. Renstra yang akan disusun harus mencerminkan semangat "Kampus Berdampak", di mana setiap program studi dan unit kerja tidak hanya berorientasi pada target, tetapi pada pemecahan nyata masalah di masyarakat dan industri, khususnya di sektor energi, konstruksi, dan kemaritiman .

Mari kita jadikan proses penyusunan Renstra ini sebagai momentum untuk melompat lebih tinggi. Dengan kolaborasi yang erat antara pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan dunia usaha, kita wujudkan Poltekba sebagai politeknik terkemuka yang adaptif, inovatif, dan berkelas dunia.



## LAMPIRAN

### 1. TABEL TARGET KINERJA

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
<b>SASARAN 1: TALENTA</b>	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi [IKU 1.1]	<b>1</b>	Persentase lulusan D3 yang lulus tepat waktu	Peningkatan Mutu dan Relevansi Lulusan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Tidak tercapainya target persentase lulusan D3 yang lulus tepat waktu akibat rendahnya perkembangan akademik mahasiswa, keterlambatan penyelesaian tugas akhir, serta lemahnya monitoring studi per mahasiswa	1) Implementasi monitoring IPK, beban SKS, dan masa studi mahasiswa 2) Penguatan peran dosen wali dalam pembimbingan akademik 3) Penjadwalan dan peran dosen pembimbing untuk melakukan kontrol terhadap proses tugas akhir/praktik kerja lapangan	Koordinator Program Studi, Ketua Jurusan, Dosen Wali, Dosen Pembimbing
	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi [IKU 1.1]	<b>2</b>	Persentase lulusan S.Tr yang lulus tepat waktu			Tidak tercapainya target persentase lulusan S.Tr yang lulus tepat waktu	



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
					akibat kompleksitas tugas akhir berupa skripsi atau proyek terapan, keterlambatan bimbingan, serta kurang optimalnya manajemen waktu studi mahasiswa.	berupa skripsi atau proyek terapan secara terstruktur dan jelas 2) Monitoring progres bimbingan secara berkala dilakukan dosen pembimbing 3) Peningkatan kapasitas dosen pembimbing dalam metode penelitian dan analisis data	Jurusan, Dosen Pembimbing
	IPK dan Masa Tunggu Lulusan	<b>3</b>	Rerata IPK Lulusan		Tidak tercapainya target rerata IPK lulusan akibat perbedaan kualitas pembelajaran antar dosen, rendahnya motivasi dan kesiapan akademik mahasiswa, serta belum optimalnya sistem evaluasi pembelajaran berbasis outcome.	1) Penerapan kurikulum OBE (Outcome-Based Education) 2) Peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi	Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (P2MPP), Ketua Jurusan, Koordinator



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
						3) Implementasi monitoring evaluasi proses pembelajaran secara berkala 4) Adanya program remedial atau ujian ulang bagi mahasiswa berisiko rendah IPK 5) Penguatan asesmen berbasis proyek dan studi kasus	Program Studi,
	IPK dan Masa Tunggu Lulusan	4	Rerata Waktu Tunggu Lulusan		Tidak tercapainya target waktu tunggu lulusan ( $\leq$ 6 bulan) akibat rendahnya kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, terbatasnya jaringan kerja sama, serta belum optimalnya layanan pengembangan karir	1) Penguatan link and match dengan dunia usaha dan industri (DUDI) melalui penyelarasa 2) kurikulum dengan kebutuhan industry 3) Optimalisasi job fair, career	UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Tim Kerja Kemahasiswaan & Kerjasama



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
					coaching, dan tracer study 4) Integrasi magang industri dan MBKM sebagai cara mempercepat rekrutmen dengan industry 5) Optimalisasi sertifikasi kompetensi dan pelatihan bagi mahasiswa	
	Persentase Lulusan yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan [IKU 1.2]	<b>5</b>	Persentase Lulusan D3 yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Tidak tercapainya target serapan lulusan D3 dalam waktu $\leq 1$ tahun akibat keterbatasan kompetensi praktis, rendahnya kesiapan kerja, serta terbatasnya akses dan jejaring dengan dunia usaha dan industri.	1) Perluasan kerja sama (MoU/MoA) dengan DUDI untuk penempatan kerja 2) Pelatihan soft skills & kemampuan dalam penyusunan CV, interview, serta, komunikasi	UPA Pengembang an Karier dan Kewirausahaan, Koordinator Program Studi, Tim Kerja Kemahasiswaan & Kerjasama



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
					3) Optimalisasi pembelajaran mata kuliah 4) Kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha 5) Optimalisasi tracer study untuk pemetaan kebutuhan industri	
	Persentase Lulusan yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan [IKU 1.2]	<b>6</b>	Persentase Lulusan S.Tr yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Tidak tercapainya target serapan lulusan S.Tr dalam waktu $\leq 1$ tahun akibat tingginya persaingan di pasar kerja, kurangnya diferensiasi kompetensi lulusan vokasi, serta belum optimalnya integrasi program akademik dengan kebutuhan industri.	Peningkatan sertifikasi kompetensi (BNSP/industri global) 2. Implementasi MBKM berbasis industri (magang, proyek riil, riset terapan) 3. Penguatan career coaching & talent mapping oleh UPA Pengembangan Karir 4. Branding lulusan vokasi yang 'Siap	UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, Koordinator Program Studi, Tim Kerja Mahasiswa & Kerjasama, Tim Akademik



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN	
					Kerja' 5. Kolaborasi dengan industri untuk rekrutmen langsung (campus hiring)		
	Persentase Mahasiswa S.Tr dan D3 berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi [IKU 1.3]	<b>7</b>		Persentase Mahasiswa S.Tr dan D3 Berkegiatan di luar program studi (Magang, Prog. Mahasiswa Berdampak, Pertukaran Pelajar, Riset).	Tidak tercapainya target partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di luar program studi (magang, MBKM, pertukaran pelajar, riset) akibat rendahnya minat mahasiswa, keterbatasan informasi program, serta kendala pendanaan dan konversi SKS.	1. Sosialisasi benefit program MBKM, magang, dan pertukaran pelajar 2. Penyediaan skema pendanaan/insentif bagi mahasiswa peserta kegiatan 3. Penyederhanaan dan kepastian konversi SKS untuk kegiatan luar prodi 4. Penunjukan PIC MBKM/prodi untuk pendampingan mahasiswa 5. Penguatan kerja sama dengan mitra (industri, kampus lain, atau lembaga riset)	Koordinator Program Studi, Tim Kerja Kemahasiswaan, Tim Kerja Akademik, Tim Kerja Kerjasama
	Persentase Mahasiswa S.Tr dan D3	<b>8</b>		Persentase Prestasi Mahasiswa di Bidang	Tidak tercapainya target prestasi mahasiswa	1. Pembentukan tim pembina	Koordinator Program



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
	berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi [IKU 1.3]	Akademik /Non Akademik yang berskala provinsi/nasional/internasional.		akibat kurangnya pembinaan terstruktur, minimnya partisipasi dalam kompetisi, serta keterbatasan dukungan pendanaan dan pelatih (Non Akademik).	lomba/pelatih per bidang 2. Penyusunan roadmap kompetisi mahasiswa (tahunan & prioritas) 3. Program coaching clinic & seleksi internal berjenjang 4. Penyediaan pendanaan kompetisi	Studi, Tim Kerja Kemahasiswaan, Tim Kerja Akademik
<b>SASARAN 2 : INOVASI</b>	Persentase Dosen Perguruan Tinggi yang mendapatkan Rekognisi Internasional atau Hasil Penelitiannya diterapkan oleh masyarakat [IKU 2.1]	<b>9</b> Persentase Dosen berkegiatan Tridharma di PT Lain	Peningkatan SDM dan Kualitas Luaran Riset yang Berdampak	Tidak tercapainya target persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain akibat terbatasnya jejaring kerja sama antar institusi, rendahnya partisipasi dosen, serta kendala administratif dan pendanaan.	1. Penguatan kerja sama antar perguruan tinggi (MoU/MoA implementatif) 2. Adanya program visiting lecturer, joint research, dan kolaborasi pengabdian 3. Penyediaan dukungan pendanaan mobilitas dosen berkegiatan 4. Penyederhanaan prosedur	Koordinator Program Studi, Tim Kerja Kemahasiswaan, Tim Kerja Akademik



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
					administratif kegiatan eksternal 5. Penetapan target kinerja dosen terkait kolaborasi eksternal dalam SKP	
	Persentase Dosen Perguruan Tinggi yang mendapatkan Rekognisi Internasional atau Hasil Penelitiannya diterapkan oleh masyarakat [IKU 2.1]	<b>10</b>	Persentase Dosen PT yang mendapatkan Rekognisi Internasional atau diterapkan oleh Masyarakat/Industri/Pemerintah per jumlah Dosen.	Tidak tercapainya target dosen yang memperoleh rekognisi internasional atau menghasilkan penelitian yang diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah akibat rendahnya kualitas dan relevansi penelitian, keterbatasan publikasi internasional, serta minimnya hilirisasi hasil riset.	1. Peningkatan kapasitas dosen dalam publikasi internasional (Scopus/WoS) 2. Penguatan kolaborasi riset internasional dan industri 3. Optimalisasi partisipasi dosen dalam hibah penelitian terapan dan hibah lainnya yang didanai oleh Kementerian maupun instansi lainnya 4. Pengembangan sistem hilirisasi dan komersialisasi riset	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator Program Studi, Tim Kerja Kerjasama



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN	
	Persentase Luaran Hasil Kerjasama dan Hilirisasi antara PT dan industri/lembaga [IKU 2.2]	<b>11</b>	Persentase Luaran Hasil Kerjasama atau Hilirisasi antara PT dan Industri/Lembaga		Tidak tercapainya target luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/lembaga akibat kerja sama yang belum implementatif, rendahnya relevansi hasil penelitian dengan kebutuhan industri, serta lemahnya mekanisme hilirisasi dan komersialisasi.	1. Penguatan kerja sama berbasis output (output-based MoU/MoA) 2. Pemetaan kebutuhan industri sebagai dasar topik riset terapan melalui Rencana Induk Penelitian (RIP) 3. Pengembangan skema pendanaan dengan industri 4. Optimalisasi Sentra HKI untuk membantu luaran HKI, paten, dan produk inovasi siap pakai	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator Program Studi, Tim Kerja Kerjasama
	Publikasi bereputasi internasional (Scopus/Wos) [IKU 2.3]	<b>12</b>	Persentase publikasi bereputasi Internasional (Scopus/WoS)		Tidak tercapainya target persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS) akibat rendahnya kapasitas penulisan ilmiah dosen, keterbatasan kolaborasi internasional, serta minimnya dukungan	1. Peningkatan kapasitas dosen melalui workshop penulisan artikel ilmiah internasional 2. Program mentoring/coaching clinic publikasi (dari drafting hingga	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator Program



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
				pendanaan dan pendampingan publikasi.	submission) 3. Penguatan kolaborasi riset internasional (co-authoring) 4. Penyediaan pendanaan publikasi dan bantuan biaya APC (Article Processing Charge) 5. Penetapan target kinerja dosen berbasis output publikasi bereputasi 6. Penyediaan bantuan proofreading, uji plagiasi, dan layanan editorial (native speaker)	Studi, Tim Kerja Akademik
	Peningkatan Kualifikasi Dosen	<b>13</b>	Persentase Dosen Kualifikasi Akademik S3	Tidak tercapainya target persentase dosen berkualifikasi S3 akibat keterbatasan minat dan kesiapan dosen untuk studi lanjut, kendala pembiayaan, serta terbatasnya akses ke	1. Penyusunan roadmap pengembangan kualifikasi dosen sesuai Bidang Keahlian setiap dosen 2. Optimalisasi	Tim Kerja Kepegawaian, Ketua Jurusan



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
				<p>perguruan tinggi tujuan yang berkualitas.</p>	<p>keikutsertaan dosen dalam hibah beasiswa S3 (LPDP, BPI, kerja sama luar negeri)            3. Pemberian izin belajar/tugas belajar yang fleksibel sesuai peraturan yang berlaku            4. Program persiapan studi lanjut (TOEFL/IELTS, proposal riset)            5. Skema studi lanjut melalui program kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain</p>	
	<p>Peningkatan Kualifikasi Dosen</p>	<p><b>14</b> Persentase Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar, dan Lektor Kepala</p>		<p>Tidak tercapainya target dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar akibat rendahnya produktivitas publikasi ilmiah, kurangnya pemahaman proses kenaikan jabatan, serta keterbatasan</p>	<p>1. Penyusunan roadmap percepatan jabatan akademik dosen            2. Program pendampingan penyusunan DUPAK dan usulan jabatan            3. Peningkatan</p>	<p>Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Tim Kerja Kepegawaian,</p>



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
				pendampingan administratif dan substansi.	produktivitas publikasi bereputasi (Scopus/WoS) 4. Optimalisasi hibah internal untuk percepatan jabatan akademik dosen sebagai syarat kenaikan jabatan akademik	Tim Kerja Akademik
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	<b>15</b>		Tidak tercapainya target persentase mata kuliah S.Tr yang menerapkan metode pembelajaran berbasis case method atau team-based project akibat rendahnya kesiapan dosen dalam mengimplementasikan metode tersebut, keterbatasan bahan ajar berbasis kasus/proyek, serta belum optimalnya desain evaluasi pembelajaran.	1. Pelatihan dosen terkait case method & project-based learning (PBL) 2. Penerapan Kurikulum OBE yang mengintegrasikan case/project 3. Pengembangan studi kasus dan proyek berbasis industri 4. Review dan monitoring implementasi metode pembelajaran di tingkat prodi	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator Program Studi, Ketua Jurusan



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
					5. Integrasi penilaian berbasis output proyek/case sebagai bagian evaluasi	
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	<b>16</b>		Tidak tercapainya target penerapan metode case method atau team-based project pada mata kuliah D3 akibat dominasi metode pembelajaran konvensional, keterbatasan kapasitas dosen, serta kurangnya integrasi dengan kebutuhan praktik industri.	1. Pelatihan praktis dosen terkait project-based learning berbasis vokasi 2. Penguatan integrasi proyek riil dari industri dalam pembelajaran 3. Penyesuaian kurikulum OBE agar mendukung learning by doing 4. Monitoring dan evaluasi implementasi pembelajaran berbasis proyek 5. Penyediaan panduan teknis penerapan PBL untuk dosen	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator Program Studi, Ketua Jurusan



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN	
	Jumlah Teknologi Terapan yang dihasilkan Program Studi	<b>17</b>	Jumlah teknologi tepat guna dengan TKT 5		Tidak tercapainya target jumlah teknologi tepat guna pada tingkat kesiapan teknologi (TKT) 5 akibat rendahnya produktivitas riset terapan di tingkat program studi, keterbatasan pendanaan, serta belum optimalnya kolaborasi dengan mitra pengguna teknologi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan skema hibah riset terapan internal berbasis kebutuhan industri/masyarakat</li> <li>2. Integrasi penelitian dosen dengan tugas akhir mahasiswa berbasis produk</li> <li>3. Kolaborasi dengan mitra pengguna (industri/masyarakat) sejak tahap perancangan</li> <li>4. Pendampingan peningkatan level TKT dari riset dasar ke prototipe (TKT 4–5)</li> <li>5. Monitoring capaian riset berbasis output teknologi (bukan hanya publikasi)</li> </ol>	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator Program Studi, Ketua Jurusan
	Jumlah Teknologi Terapan yang dihasilkan Program Studi	<b>18</b>	Jumlah Teknologi Tepat Guna dengan TKT 7		Tidak tercapainya target teknologi dengan TKT 7 akibat lemahnya hilirisasi	1. Penguatan program hilirisasi dan komersialisasi	Pusat Penelitian dan



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
				<p>riset, kurangnya uji coba di lingkungan nyata, serta keterbatasan dukungan industri dalam implementasi teknologi.</p>	<p>hasil riset            2. Menyediakan uji coba teknologi di lapangan (real environment)            3. Kolaborasi intensif dengan industri untuk adopsi teknologi            4. Penyediaan pendanaan lanjutan (matching fund/prototyping scale-up)            5. Optimalisasi Sentra HKI, untuk proses HKI, paten, dan sertifikasi produk</p>	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator Program Studi, Sentra HKI</p>
	Luaran Lainnya yang Dihasilkan Program Studi	<b>19</b>	Jumlah Paten Sederhana	<p>Tidak tercapainya target jumlah paten sederhana akibat rendahnya kesadaran dan pemahaman dosen terhadap pentingnya HKI, keterbatasan pendampingan proses pendaftaran, serta</p>	<p>1. Sosialisasi dan pelatihan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI)            2. Pendampingan penyusunan dokumen paten sederhana (draft, klaim, dll.)</p>	<p>Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator Program</p>



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
				<p>minimnya hasil riset yang siap dipatenkan.</p>	<p>3. Identifikasi hasil riset yang berpotensi dipatenkan sejak awal 4. Penyediaan skema pendanaan publikasi HKI, khususnya paten sederhana 5. Integrasi riset terapan dengan target output paten</p>	<p>Studi, Sentra HKI</p>
	<p>Luaran Lainnya yang Dihasilkan Program Studi</p>	<p><b>20</b></p>	<p>Jumlah Buku Ber-ISBN</p>	<p>Tidak tercapainya target jumlah buku ber-ISBN akibat rendahnya produktivitas penulisan dosen, kurangnya pendampingan penulisan buku, serta keterbatasan waktu dan insentif.</p>	<p>1. Program coaching penulisan buku ajar/referensi ber-ISBN 2. Menyediakan bantuan proses penerbitan dan pengurusan ISBN 3. Integrasi bahan ajar mata kuliah menjadi buku ajar 4. Penyediaan insentif penulisan buku ber-ISBN 5. Penetapan target</p>	<p>Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (P2MPP), Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator</p>



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN	
					luaran buku dalam kinerja dosen	Program Studi	
	Luaran Lainnya yang Dihasilkan Program Studi	<b>21</b>		Jumlah Penelitian/PKM sesuai dengan Visi Keilmuan yang mendapatkan Sumber Pembiayaan Luar Negeri	Tidak tercapainya target penelitian/PkM dengan pendanaan luar negeri akibat rendahnya akses informasi hibah internasional, keterbatasan kemampuan penyusunan proposal kompetitif, serta minimnya jejaring kolaborasi global.	1. Diseminasi informasi hibah internasional secara berkala 2. Pelatihan penyusunan proposal hibah internasional (grant writing) 3. Penguatan jejaring dan kolaborasi internasional 4. Penyediaan program kemitraan dengan perguruan tinggi atau lembaga luar negeri 5. Pendampingan submission proposal hingga tahap seleksi	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Tim Kerja Kerjasama, Tim Kerja Akademik
	Persentase Penelitian Berekala Internasional	<b>22</b>		Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi	Tidak tercapainya target jumlah publikasi internasional bereputasi dari kolaborasi internasional akibat lemahnya kontribusi	1. Penguatan kolaborasi riset internasional berbasis output publikasi (co-authoring)	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
				dalam kerja sama riset, tidak adanya kolaborasi dengan mitra luar negeri.	2. Penetapan target publikasi dalam setiap kerja sama internasional 3. Peningkatan kompetensi bahasa internasional untuk komunikasi dengan mitra internasional 4. Pendampingan penulisan artikel bersama mitra internasional 5. Adanya hibah publikasi hasil kolaborasi internasional	(P3M), Tim Kerja Kerjasama, Tim Kerja Akademik, UPA Bahasa
	Persentase Penelitian Berskala Internasional	<b>23</b>	Persentase Penelitian	Tidak tercapainya target persentase penelitian berkolaborasi internasional akibat terbatasnya jejaring global dosen, rendahnya inisiasi kerja sama riset, serta kendala bahasa dan administrasi dalam kolaborasi lintas negara.	1. Pengembangan jejaring internasional (academic networking & partnership) 2. Pengembangan program joint research dan visiting researcher 3. Peningkatan kapasitas dosen	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Tim Kerja Kerjasama, Tim Kerja



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN	
					dalam bahasa Inggris akademik 4. Penetapan target kolaborasi internasional dalam kinerja dosen	Akademik, UPA Bahasa	
<b>SASARAN 3 : KONTRIBUSI / DEDIKASI PADA MASYARAKAT</b>	Persentase dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs Lain Sesuai Keunggulan [IKU 3.1]	<b>24</b>	Persentase Dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 SDGs lain sesuai keunggulan	Peningkatan Peran Lembaga di Perguruan Tinggi dalam Layanan Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi	Tidak tercapainya target kontribusi pada SDGs (SDG 1, 4, 17 dan SDGs unggulan institusi) akibat belum terintegrasinya program tridharma dengan agenda SDGs, kurangnya pemetaan kegiatan terhadap indikator SDGs, serta rendahnya dokumentasi dan pelaporan capaian.	1. Integrasi SDGs ke dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian masyarakat 2. Penyusunan roadmap SDGs institusi berbasis keunggulan prodi/jurusan 3. Kolaborasi dengan mitra (pemerintah, industri, NGO) untuk program berbasis SDGs	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator Program Studi, Tim Kerja Akademik, Tim Kerja Perencanaan
	Persentase dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs Lain Sesuai Keunggulan [IKU 3.1]	<b>25</b>	Persentase dalam SDG 6 (Akses Air dan Sanitasi) dan 13 (Penanganan Perubahan Iklim)		Tidak tercapainya target kontribusi pada SDG 6 dan SDG 13 akibat terbatasnya program riset dan pengabdian di bidang lingkungan, kurangnya kolaborasi	1. Pengembangan program riset dan PkM berbasis isu lingkungan dan keberlanjutan 2. Integrasi topik green campus &	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M),



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
				<p>lintas sektor, serta rendahnya kesadaran sivitas akademika terhadap isu keberlanjutan.</p>	<p>sustainability dalam pembelajaran            3. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan industri dalam program lingkungan            4. Kampanye dan edukasi internal terkait SDGs &amp; perubahan iklim            5. Monitoring capaian kegiatan berbasis indikator SDG 6 &amp; 13</p>	<p>Koordinator Program Studi, Tim Kerja Akademik</p>
	<p>Persentase Sumber daya manusia (SDM) Pendidikan Tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri) [IKU 3.2]</p>	<p><b>26</b> Persentase Dosen terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)</p>		<p>Tidak tercapainya target persentase dosen yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan nasional/daerah/industri akibat terbatasnya jejaring dengan pemangku kebijakan, rendahnya pengakuan terhadap kepakaran dosen, serta minimnya dokumentasi keterlibatan dosen dalam kegiatan kebijakan.</p>	<p>1. Penguatan jejaring dengan pemerintah, industri, dan lembaga kebijakan            2. Pemetaan dan promosi kepakaran dosen (expertise mapping)            3. Optimalisasi keterlibatan dosen sebagai narasumber, tim ahli, atau konsultan kebijakan            4. Pengembangan</p>	<p>Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator Program Studi, Tim Kerja Kerjasama, Tim Kerja Akademik</p>



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
						kerja sama berbasis policy research dan advisory 5. Sistem pencatatan dan pelaporan keterlibatan dosen dalam kegiatan kebijakan	
	Kemitraan Jurusan	<b>27</b>	Jumlah Kerjasama yang sesuai dengan bidang keahlian jurusan yang Berskala Internasional		Tidak tercapainya target jumlah kerja sama internasional yang relevan dengan bidang keahlian jurusan akibat terbatasnya jejaring global, kerja sama yang belum berbasis implementasi, serta rendahnya kapasitas dosen dalam membangun kolaborasi internasional.	1. Penguatan jejaring melalui international networking & partnership program 2. Pengembangan kerja sama berbasis implementasi (joint research, joint publication, student exchange) 3. Penetapan prioritas mitra strategis sesuai keunggulan jurusan 4. Optimalisasi dosen dalam kegiatan internasional (conference, visiting lecturer)	Koordinator Program Studi, Tim Kerja Kerjasama, Tim Kerja Akademik, Ketua Jurusan



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
					5. Monitoring kerja sama berbasis output (bukan hanya MoU)	
	Kemitraan Jurusan	<b>28</b>	Jumlah Kerjasama yang sesuai dengan bidang keahlian jurusan yang Berskala Internasional	Tidak tercapainya target jumlah kerja sama nasional akibat kerja sama yang bersifat administratif (tidak implementatif), kurangnya inisiatif proaktif dari jurusan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi mitra lokal/industri.	1. Pengembangan kerja sama dengan industri, pemerintah daerah, dan lembaga nasional 2. Penyusunan kerja sama berbasis kebutuhan nyata (problem-based collaboration) 3. Integrasi kerja sama dengan kegiatan magang, riset terapan, dan PkM 4. Monitoring dan evaluasi kerja sama berbasis output dan outcome	Koordinator Program Studi, Tim Kerja Kerjasama, Ketua Jurusan
	Pengembangan Program Studi	<b>29</b>	Jumlah Program Studi Terakreditasi Unggul	Tidak tercapainya target jumlah program studi terakreditasi unggul akibat belum terpenuhinya standar	1. Penyusunan roadmap akreditasi prodi (by target tahun) 2. Penguatan sistem	Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
				akreditasi (SDM, kurikulum, luaran tridharma), lemahnya tata kelola dokumen, serta kurangnya kesiapan dalam proses reakreditasi.	penjaminan mutu internal (SPMI) 3. Pendampingan intensif penyusunan LED & LKPS 4. Peningkatan kinerja tridharma (publikasi, pengabdian, kerja sama) 5. Simulasi dan penilaian mandiri sebelum asesmen lapangan	Pembelajaran (P2MPP), Koordinator Program Studi, Ketua Jurusan, Tim Kerja Akademik
	Pengembangan Program Studi	<b>30</b>	Penambahan Jumlah Program Studi Baru	Tidak tercapainya target pembukaan program studi baru akibat ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar/industri, keterbatasan SDM dosen, serta kendala administratif dan perizinan.	1. Penyusunan feasibility study (studi kelayakan) berbasis kebutuhan industri 2. Pemenuhan SDM dosen sesuai bidang dan kualifikasi 3. Penyusunan kurikulum berbasis OBE & kebutuhan pasar kerja 4. Penguatan dukungan sarana	Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (P2MPP, Tim Pembukaan Prodi Baru, Tim Kerja Akademik



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
					prasarana dan laboratorium 5. Pendampingan proses perizinan pembukaan prodi baru	
	Pengembangan Program Studi	<b>31</b>	Jumlah Laboratorium/Workshop Tersertifikasi Internasional	Tidak tercapainya target jumlah laboratorium/workshop tersertifikasi internasional akibat keterbatasan fasilitas dan standar peralatan, kurangnya kesiapan sistem manajemen mutu laboratorium, serta tingginya biaya sertifikasi.	1. Penyusunan roadmap sertifikasi laboratorium internasional 2. Pemenuhan standar peralatan dan SOP laboratorium 3. Implementasi sistem manajemen mutu (misal: ISO/standar internasional terkait) 4. Pelatihan teknisi/laboran terkait standar operasional 5. Pengalokasian anggaran khusus untuk proses sertifikasi	Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN	
<b>SASARAN 4 : TATA KELOLA BERINTEGRI - TAS</b>	Pendapatan/Penghasilan dari Bidang Non-Akademik (selain UKT/Uang Kuliah) [IKU 4.1]	<b>32</b>	Persentase Pendapatan Terhadap Total Aset	Peningkatan Tata Kelola Perguruan Tinggi	Tidak tercapainya target persentase pendapatan non-akademik terhadap total aset akibat rendahnya optimalisasi aset institusi, terbatasnya unit usaha yang produktif, serta belum maksimalnya strategi pendapatan	1. Optimalisasi pemanfaatan aset kampus (gedung, laboratorium, fasilitas) untuk income generating 2. Pengembangan unit usaha kampus (training, sertifikasi, konsultasi, jasa profesional) 3. Penyusunan strategi komersialisasi layanan berbasis kompetensi jurusan 4. Kemitraan dengan industri untuk program joint revenue	Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum
	<b>33</b>	Persentase Alokasi Pendapatan Dana Masyarakat untuk Upskilling dan Upgrading Dosen			Alokasi dana untuk upskilling dan upgrading dosen tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tridharma (pembelajaran, penelitian, dan	1. Mengaitkan program pengembangan dosen dengan target IKU spesifik (publikasi, hilirisasi, pembelajaran berbasis proyek)	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), Koordinator



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
				pengabdian), sehingga tidak berkontribusi optimal terhadap pencapaian IKU dan daya saing institusi.	2. Menerapkan hasil pelatihan untuk proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 3. Evaluasi efektivitas program berbasis outcome, bukan hanya keikutsertaan pelatihan namun ada sertifikasi kompetensi yang diikuti.	Program Studi, Ketua Jurusan, Tim Kerja Kepegawaian
	Pendapatan/Penghasilan dari Bidang Non-Akademik (selain UKT/Uang Kuliah) [IKU 4.1]	<b>34</b>	Persentase Alokasi Pendapatan Dana Masyarakat untuk Updating Laboratorium	Tidak tercapainya target alokasi dana untuk modernisasi laboratorium akibat keterbatasan pendapatan non-akademik, tingginya biaya pengadaan peralatan, serta belum adanya perencanaan prioritas pengembangan laboratorium.	1. Penyusunan roadmap pengembangan laboratorium berbasis prioritas 2. Alokasi anggaran khusus untuk upgrading peralatan dan teknologi 3. Pemanfaatan kerja sama industri untuk co-funding atau hibah alat	Ketua Jurusan, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
					4. Integrasi laboratorium sebagai income generating unit (training/sertifikasi)	
	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani [IKU 4.2]	<b>35</b>	Unit Kerja/PT yang menerapkan Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Implementasi Zona Integritas (WBK/WBBM) tidak berjalan secara substansial, sehingga tidak menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola, kualitas layanan, dan budaya anti korupsi di lingkungan institusi.	6) pelayanan prima	Satuan Pengawas Internal (SPI), Tim ZI-WBK, Bagian Keuangan, Perencanaan dan Umum
	Hasil Audit atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi [IKU 4.3a]	<b>36</b>	Hasil Audit atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi	Tidak tercapainya opini audit yang baik (WTP) atas laporan keuangan perguruan tinggi akibat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi, serta rendahnya kualitas tata kelola keuangan.	1. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Implementasi standar akuntansi yang berlaku 3. Peningkatan kapasitas SDM keuangan melalui pelatihan dan sertifikasi 4. Audit internal berkala oleh SPI	Satuan Pengawas Internal (SPI), Bagian Keuangan, Perencanaan dan Umum



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
					sebelum audit eksternal 5. Digitalisasi sistem keuangan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi 6. Tindak lanjut cepat atas temuan audit sebelumnya	
	Predikat SAKIP Perguruan Tinggi [IKU 4.3b]	<b>37</b>	Predikat SAKIP Perguruan Tinggi	Tidak tercapainya predikat SAKIP yang optimal, akibat belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara berbasis hasil (outcome), sehingga tidak mencerminkan akuntabilitas kinerja institusi secara menyeluruh.	1. Integrasi penuh perencanaan – penganggaran – kinerja – pelaporan (logic model) 2. Penyusunan indikator berbasis outcome dan impact (bukan hanya output) 3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala (triwulan/semester) 4. Penguatan peran Unit Perencanaan dan SPI dalam pengendalian kinerja	Satuan Pengawas Internal (SPI), Bagian Keuangan, Perencanaan dan Umum



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN	
	Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik [IKU 4.3c]	<b>38</b>	Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik		<p>Tidak efektifnya sistem pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik, sehingga meningkatkan kasus pelanggaran (plagiarisme, kecurangan akademik, manipulasi data) yang berdampak pada penurunan kualitas lulusan dan reputasi institusi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan implementasi kebijakan integritas akademik yang jelas dan tegas</li> <li>2. Penggunaan sistem plagiarism checker (Turnitin atau sejenis) secara wajib</li> <li>3. Integrasi nilai integritas dalam pembelajaran dan budaya kampus</li> <li>4. Pembentukan tim etik/komite disiplin akademik</li> <li>5. Sosialisasi dan edukasi terkait academic integrity kepada mahasiswa &amp; dosen</li> <li>6. Sistem pelaporan dan penanganan kasus yang transparan dan terdokumentasi</li> </ol>	<p>Tim Komite Integritas Akademik, Ketua Jurusan, Tim Kerja Akademik</p>



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN	
	Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Anti Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya (Narkoba); dan Anti Korupsi [IKU 4.3d]	<b>39</b>	Persentase Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Anti Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya Lainnya (Narkoba), dan Anti Korupsi		Tidak efektifnya sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, serta praktik korupsi, sehingga meningkatkan potensi kasus yang berdampak pada keselamatan sivitas akademika, kualitas lingkungan kampus, dan reputasi institusi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan implementasi kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan, narkoba, dan korupsi</li> <li>2. Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada mahasiswa dan dosen</li> <li>3. Pembentukan satgas (satuan tugas) khusus penanganan kasus</li> <li>4. Penyediaan sistem pelaporan (whistleblowing system) yang aman dan rahasia</li> <li>5. Kerja sama dengan pihak eksternal (BNN, kepolisian, lembaga terkait)</li> </ol>	Satuan Pengawas Internal (SPI), Tim Kerja Kemahasiswaan, Tim Kerja Kerjasama, Satgas PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi)
	Ketersediaan Perencanaan Strategis Peningkatan	<b>40</b>	Ketersediaan Perencanaan Strategis		Tidak tersusunnya atau tidak efektifnya perencanaan strategis	1. Integrasi kesejahteraan dengan capaian IKU	Ketua Jurusan, Bagian



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
	Kesejahteraan Dosen [IKU 4.4]		Peningkatan Kesejahteraan Dosen	peningkatan kesejahteraan dosen yang berdampak pada menurunnya motivasi, kinerja, dan retensi dosen, sehingga menghambat pencapaian kinerja tridharma dan tujuan strategis institusi.	(publikasi, hilirisasi, pengabdian) 2. Survei dan monitoring kepuasan dosen (employee engagement) 3. Benchmarking dengan perguruan tinggi lain	Perencanaan, Keuangan dan Umum, Tim Kerja Kepegawaian
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L [IKU 4.5]	<b>41</b>	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Tidak tercapainya nilai kinerja anggaran yang optimal akibat ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas penggunaan anggaran dan tidak tercapainya target kinerja institusi.	1. Integrasi perencanaan–penganggaran–kinerja 2. Penyusunan anggaran berbasis IKU dan output/outcome 3. Monitoring realisasi anggaran secara berkala (bulanan/triwulan) 4. Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran 5. Optimalisasi penggunaan	Satuan Pengawas Internal (SPI), Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	PERNYATAAN RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PJ PERLAKUAN
					digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan anggaran	
	Pengembangan Saran dan Prasarana	42		Penambahan Bangunan/Gedung	Tidak tercapainya target penambahan bangunan/gedung atau tidak optimalnya pemanfaatan sarana prasarana baru, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas layanan, kualitas pembelajaran, dan pengembangan institusi.	1. Penyusunan masterplan pengembangan kampus berbasis kebutuhan jangka panjang 2. Pemanfaatan gedung untuk beberapa fungsi & income generating asset 3. Monitoring sarana prasarana pasca pembangunan 4. Pengendalian anggaran dan audit proyek secara berkala



## 2. TABEL SASARAN, INDIKATOR, DAN PROGRAM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			PERHITUNGAN	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	
SASARAN 1: TALENTA	Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi [IKU 1.1]	1	Persentase Lulusan D3 yang Lulus Tepat Waktu	IKU	Akumulatif	90%	92%	92%	92%	92%
		2	Persentase Lulusan S.Tr yang Lulus Tepat Waktu	IKU	Akumulatif	90%	92%	92%	92%	92%
	IPK dan Masa Tunggu Lulusan	3	Rerata IPK Lulusan	IKT	Nominal	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45
		4	Rerata Waktu Tunggu Lulusan	IKT	Nominal	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan
	Persentase Lulusan yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan [IKU 1.2]	5	Persentase Lulusan D3 yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	IKU	Akumulatif	80%	80%	80%	80%	80%
		6	Persentase Lulusan S.Tr yang langsung bekerja/melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/berwirausaha dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	IKU	Akumulatif	80%	80%	80%	80%	80%
	Persentase Mahasiswa S.Tr dan D3 berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi [IKU 1.3]	7	Persentase Mahasiswa S.Tr dan D3 berkegiatan di luar program studi (Magang, Prog. Mahasiswa Berdampak, Pertukaran Pelajar, Riset)	IKU	Akumulatif	25%	25%	25%	25%	25%
		8	Persentase Prestasi Mahasiswa di Bidang Akademik/Non Akademik yang berskala provinsi/nasional/Internasional	IKU	Akumulatif	5%	5%	5%	5%	5%
SASARAN 2: INOVASI	Persentase Dosen Perguruan Tinggi yang mendapatkan Rekognisi Internasional atau Hasil Penelitiannya diterapkan	9	Persentase Dosen Berkegiatan Tridharma di PT Lain	IKU	Akumulatif	10%	12%	12%	13%	13%
		10	Persentase Dosen PT yang mendapatkan Rekognisi Internasional atau diterapkan oleh Masyarakat /industri /pemerintah per jumlah dosen	IKU	Akumulatif	16%	17%	18%	18%	18%
	Persentase Luaran Hasil Kerjasama dan Hilirisasi antara PT dan industri/lembaga [IKU 2.2]	11	Persentase Luaran Hasil Kerjasama dan hilirisasi antara PT dan industri/lembaga	IKU	Akumulatif	7%	10%	12%	15%	17%
	Publikasi bereputasi internasional (Scopus/Wos) [IKU 2.3]	12	Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/Wos)	IKU	Nominal	10%	10%	12%	14%	16%
	Peningkatan Kualifikasi dosen	13	Persentase Dosen Kualifikasi Akademik S3	IKT	Akumulatif	10%	12%	13%	25%	30%
		14	Persentase Dosen dengan Jabatan Akademik Guru Besar, dan Lektor Kepala	IKT	Akumulatif	7%	10%	11%	12%	15%
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot	15	Persentase mata kuliah Prodi S.Tr menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	IKT	Akumulatif	40%	45%	50%	55%	60%
		16	Persentase mata kuliah Prodi D3 menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	IKT	Akumulatif	40%	45%	50%	55%	60%
	Jumlah Teknologi Terapan yang dihasilkan Program Studi	17	Jumlah Teknologi Tepat Guna dengan TKT 5	IKU	Akumulatif	5	5	6	6	6
		18	Jumlah Teknologi Tepat Guna dengan TKT 7	IKU	Akumulatif	2	2	2	3	3
	Luaran Lainnya yang dihasilkan Program Studi	19	Jumlah Paten Sederhana	IKT	Akumulatif	-	-	1	1	2
		20	Jumlah Buku Ber-ISBN	IKT	Akumulatif	20	30	35	40	45
		21	Jumlah Penelitian/PkM sesuai dengan Visi Keilmuan yang mendapatkan Sumber Pembiayaan Luar Negeri	IKT	Akumulatif	1	1	2	2	3
	Persentase Penelitian Berkolaborasi Internasional	22	Jumlah Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi	IKU	Nominal	4	5	11	11	12
		23	Persentase Penelitian	IKU	Akumulatif	1%	1%	1%	1.50%	1.50%



<b>SASARAN 3: KONTRIBUSI/DEDIKASI PADA MASYARAKAT</b>	Persentase dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs Lain Sesuai Keunggulan <b>[IKU 3.1]</b>	24	Persentase dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs Lain Sesuai Keunggulan	IKU	Akumulatif	80%	82%	85%	85%	87%
		25	Persentase dalam SDG 6 (Akses Air dan Sanitasi) dan 13 (Penanganan Perubahan Iklim)	IKU	Akumulatif	80%	82%	85%	85%	87%
	Persentase Sumber daya manusia (SDM) Pendidikan Tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri) <b>[IKU 3.2]</b> Kemitraan Jurusan	26	Persentase Dosen terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	IKU	Nominal	25%	25%	27%	30%	32%
		27	Jumlah Kerjasama yang sesuai dengan bidang keahlian jurusan yang Berskala Internasional	IKT	Akumulatif	5	5	6	6	7
	Pengembangan Program Studi	28	Jumlah Kerjasama yang sesuai dengan bidang keahlian jurusan yang Berskala Nasional	IKT	Akumulatif	5	5	7	7	9
		29	Jumlah Program Studi Terakreditasi Unggul	IKT	Akumulatif	1	1	3	4	4
		30	Penambahan Jumlah Program Studi Baru	IKT	Akumulatif	2	4	2	2	2
		31	Jumlah Laboratorium/Workshop Tersertifikasi Internasional	IKT	Akumulatif	-	3	5	7	9
<b>SASARAN 4: TATA KELOLA BERINTEGRITAS</b>	Pendapatan/Penghasilan dari Bidang Non-Akademik (selain UKT/Uang Kuliah) <b>[IKU 4.1]</b>	32	Persentase Pendapatan terhadap Total Aset	IKU	Akumulatif	1.8%	1.8%	2.0%	2.5%	3.0%
		33	Persentase Alokasi Pendapatan Dana Masyarakat untuk Upskilling dan Upgrading Dosen	IKU	Akumulatif	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%
		34	Persentase Alokasi Pendapatan Dana Masyarakat untuk Updating Laboratorium	IKU	Akumulatif	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%
	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani <b>[IKU 4.2]</b> Hasil Audit atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi <b>[IKU 4.3a]</b>	35	Unit kerja/PT yang menerapkan Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	IKU	Nominal	1	1	1	1	1
		36	Hasil Audit atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi	IKU	Nominal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Predikat SAKIP Perguruan Tinggi <b>[IKU 4.3b]</b> Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik <b>[IKU 4.3c]</b>	37	Predikat SAKIP Perguruan Tinggi	IKU	Nominal	A	A	AA	AA	AA
		38	Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	IKU	Nominal	0	0	0	0	0
	Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Anti Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya (Narkoba); dan Anti Korupsi <b>[IKU 4.3d]</b> Ketersediaan Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen <b>[IKU 4.4]</b>	39	Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Anti Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya (Narkoba); dan Anti Korupsi	IKU	Nominal	100%	100%	100%	100%	100%
		40	Ketersediaan Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen	IKU	Nominal	1	1	1	1	1
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL <b>[IKU 4.5]</b> Pengembangan Sarana dan Prasarana	41	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL	IKU	Nominal	91.09%	92%	92%	92%	92%
42		Penambahan Bangunan/Gedung	IKT	Akumulatif	-	1	1	1	2	